



Penerbit
Yayasan
Tri Edukasi Ilmiah

ILMU POLITIK DAN DINAMIKA KEKUASAAN

Penulis:

Arditya Prayogi, M.Hum. | Pirma Windra, S.I.P., M.I.P.

Muhammad Akbar Maulana, S.I.P., M.I.P. | Apsas Saputra, S.A.P., M.A.P.

Kharis Kurnia, S.E., M.Si. | Hamzah Jamaludin, S.I.P., M.Sos.

Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H. | Syarkawi, S.A.P., M.A.P.

Muhamad Hanif Fuadi, M.Sos. | Dr. Hajir Bahrn Maula, S.Sos., M.Si.



ILMU POLITIK DAN DINAMIKA KEKUASAAN

Penulis:

Arditya Prayogi, M. Hum.
Pirma Windra, S.I.P., M.I.P.
Muhammad Akbar Maulana, S.I.P., M.I.P.
Apsas Saputra, S.A.P., M.A.P.
Kharis Kurnia, S.E., M.Si.
Hamzah Jamaludin, S.I.P., M. Sos.
Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H.
Syarkawi, S.A.P., M.A.P.
Muhamad Hanif Fuadi, M. Sos.
Dr. Hajir Bahrhun Maula, S. Sos., M.Si.

Editor:

Dr. Selvi Yona Sari, S.E., M.M.



Yayasan
Tri edukasi Ilmiah

PENERBIT YAYASAN TRI EDUKASI ILMIAH

edukasi.ilmiah03@gmail.com

Ilmu Politik dan Dinamika Kekuasaan

Penulis:

Arditya Prayogi, M.Hum.
Pirma Windra, S.I.P., M.I.P.
Muhammad Akbar Maulana, S.I.P., M.I.P.
Apsas Saputra, S.A.P., M.A.P.
Kharis Kurnia, S.E., M.Si.
Hamzah Jamaludin, S.I.P., M.Sos.
Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H.
Syarkawi, S.A.P., M.A.P.
Muhamad Hanif Fuadi, M.Sos.
Dr. Hajir Bahrn Maula, S.Sos., M.Si.

Editor:

Dr. Selvi Yona Sari, S.E., M.M.

ISBN: 978-634-7474-67-4

Design Cover:

Tim Tri Edukasi Ilmiah

Layout:

Rangga Kari Pratama, S.S.

All right reserved

Agam, Sumatera Barat

Diterbitkan oleh: **Yayasan Tri Edukasi Ilmiah**

Redaksi:

Komplek Delta Emporio No.227, Jalan Raya Pakan Kamis, Gadut, Tilatang
Kamang, Kab. Agam, Sumatera Barat

Anggota IKAPI No. 49/SBA/2024

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak karya
tulisi ini dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit.

Cetakan Pertama: 13 Maret 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku *Ilmu Politik dan Dinamika Kekuasaan* ini. Buku ini hadir sebagai upaya untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif, kontekstual, dan reflektif mengenai politik sebagai disiplin ilmu sekaligus praktik sosial yang senantiasa bergerak mengikuti denyut perubahan zaman.

Politik bukan sekadar arena perebutan kekuasaan, tetapi juga ruang pertemuan gagasan, kepentingan, nilai, serta aspirasi masyarakat. Dalam konteks tersebut, buku ini dirancang untuk membedah konsep-konsep fundamental ilmu politik, mulai dari teori negara, demokrasi, sistem pemerintahan, partai politik, hingga dinamika kekuasaan dalam praktik ketatanegaraan dan kehidupan publik.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, serta pembaca umum yang memiliki minat terhadap kajian politik. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi yang tidak hanya memperkaya wawasan akademik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis terhadap praktik kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semoga buku ini memberi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu politik dan pembentukan pemikiran yang lebih matang dalam memahami dinamika kekuasaan.

SINOPSIS

Ilmu Politik dan Dinamika Kekuasaan mengupas politik sebagai disiplin ilmu yang tidak terlepas dari realitas sosial, institusi negara, dan relasi kekuasaan yang terus berkembang. Buku ini menyajikan pembahasan menyeluruh mengenai konsep-konsep dasar ilmu politik, termasuk negara, kekuasaan, legitimasi, demokrasi, sistem politik, sistem pemerintahan, partai politik, serta peran masyarakat dalam proses politik.

Selain menguraikan landasan teoretis, buku ini juga mengkaji bagaimana kekuasaan bekerja dalam praktik, baik melalui mekanisme formal seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun melalui dinamika informal yang membentuk kebijakan publik dan arah pembangunan nasional. Perhatian khusus diberikan pada konteks politik Indonesia, sehingga pembaca dapat memahami relevansi teori dengan dinamika empiris yang terjadi.

Disusun secara sistematis dan analitis, buku ini membantu pembaca menelusuri hubungan antara teori politik dan praktik kekuasaan, sekaligus mendorong kemampuan berpikir kritis dalam menilai proses politik yang berlangsung. Dengan pendekatan yang integratif dan bahasa yang lugas, buku ini menjadi referensi penting bagi siapa pun yang ingin memahami bagaimana kekuasaan dibangun, dijalankan, dan diawasi dalam sistem politik modern.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SINOPSIS	iv
DAFTAR ISI	v
ILMU POLITIK SEBAGAI ILMU SOSIAL	1
<i>Oleh: Arditya Prayogi.....</i>	1
1.1. Objek Kajian Ilmu Politik dalam Tradisi Ilmu Sosial	1
1.2. Ilmu Politik dan Pendekatan Kekuasaan.....	6
1.3. Ilmu Politik Sebagai Ilmu Empiris	12
1.4. Relevansi Ilmu Politik dalam Masyarakat Kontemporer.....	16
KONSEP KEKUASAAN DALAM POLITIK	23
<i>Oleh: Pirma Windra, S.I.P., M.I.P.....</i>	23
2.1. Pendahuluan	23
2.2. Pengertian Kekuasaan dalam Perspektif Ilmu Politik	24
2.3. Tipologi Kekuasaan: Tiga Dimensi Steven Lukes	26
2.4. Sumber-Sumber Kekuasaan Politik	27
2.5. Kekuasaan, Legitimasi, dan Otoritas.....	28
2.6. Kekuasaan dalam Sistem Politik Modern.....	30
NEGARA DAN KEDAULATAN.....	33
<i>Oleh: Muhammad Akbar Maulana, S.I.P., M.I.P.</i>	33
3.1. Pendahuluan	33
3.2. Konsep dan Pengertian Negara.....	36
3.3. Teori-Teori Kedaulatan	42
3.4. Bentuk-Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan.....	48
3.5. Kedaulatan dalam Era Globalisasi	50
SISTEM POLITIK DAN STRUKTUR KEKUASAAN.....	55
<i>Oleh: Apsas Saputra, S.A.P., M.A.P.</i>	55
4.1. Konsep dan Pengertian Sistem Politik	55
4.2. Struktur Kekuasaan dalam Sistem Politik	60

4.3. Dinamika Kekuasaan dalam Sistem Politik	64
4.4. Sistem Politik dan Struktur Kekuasaan dalam Konteks Negara Berkembang	68
4.5. Penutup.....	69
IDEOLOGI POLITIK DAN PENGARUHNYA	72
<i>Oleh: Kharis Kurnia, S.E., M.Si.</i>	72
5.1. Pendahuluan: Mengapa Ideologi Penting?	72
5.2. Konsep dan Definisi Ideologi Politik	73
5.3. Spektrum dan Jenis-Jenis Ideologi Politik Utama	77
5.4. Mekanisme Pengaruh Ideologi: Dari Pikiran hingga Kebijakan.....	82
5.5. Studi Kasus: Dinamika Ideologi di Indonesia.....	86
5.6. Kesimpulan: Relevansi Abadi Ideologi Politik	90
DEMOKRASI DAN OLIGARKI	94
<i>Oleh: Hamzah Jamaludin, S.I.P., M.Sos.</i>	94
6.1. Pengertian dan Konsep Dasar Demokrasi.....	94
6.2. Pengertian dan Konsep Dasar Oligarki	97
6.3. Sejarah Perkembangan Demokrasi dan Oligarki	99
6.4. Prinsip, Ciri, dan Mekanisme Sistem Demokrasi.....	103
6.5. Struktur Kekuasaan dan Pola Pemerintahan Oligarki.....	106
6.6. Perbandingan Demokrasi dan Oligarki dalam Praktik Pemerintahan Modern	108
PEMILU, LEGITIMASI, DAN STABILITAS POLITIK.....	113
<i>Oleh: Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H.</i>	113
7.1. Pendahuluan	113
7.2. Pemilu dalam Perspektif Ilmu Politik.....	115
7.3. Konsep dan Teori Legitimasi Politik.....	119
7.4. Relasi Pemilu dan Legitimasi Kekuasaan	122
7.5. Pemilu dan Stabilitas Politik.....	125
7.6. Tantangan Kontemporer dalam Penyelenggaraan Pemilu..	127
7.7. Implikasi Pemilu terhadap Demokrasi dan Tata Kelola	

Politik	130
7.8. Penutup.....	132
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI INSTRUMEN KEKUASAAN	135
<i>Oleh: Syarkawi, S.A.P., M.A.P.</i>	135
8.1. Pendahuluan	135
8.2. Konsep Kebijakan Publik.....	137
8.3. Kekuasaan Dalam Kebijakan Publik.....	139
8.4. Proses Kekuasaan dan Dinamika Kekuasaan	141
8.5. Kebijakan Publik dan Legitimasi Kekuasaan.....	143
8.6. Penutup.....	146
MEDIA, OPINI PUBLIK, DAN KEKUASAAN	149
<i>Oleh: Muhamad Hanif Fuadi, M.Sos.</i>	149
9.1. Pendahuluan	149
9.2. Media sebagai Instrumen Kekuasaan.....	151
9.3. Opini Publik dalam Politik	153
9.4. Kekuasaan dan Dinamika Politik	155
9.5. Korelasi Media, Opini Publik dan Kekuasaan	160
KONFLIK POLITIK DAN RESOLUSI KEKUASAAN	167
<i>Oleh: Dr. Hajir Bahrin Maula, S.Sos., M.Si.</i>	167
10.1. Konflik Politik.....	167
10.2. Resolusi Kekuasaan	168
PROFIL PENULIS.....	174

ILMU POLITIK SEBAGAI ILMU SOSIAL

Oleh: Arditya Prayogi

1.1. Objek Kajian Ilmu Politik dalam Tradisi Ilmu Sosial

Objek kajian ilmu politik dalam tradisi ilmu sosial berangkat dari pemahaman bahwa politik adalah gejala sosial yang muncul ketika manusia harus mengatur kehidupan bersama di tengah perbedaan kepentingan dan keterbatasan sumber daya. Karena itu, fokusnya tidak hanya pada negara sebagai institusi, tetapi pada relasi kekuasaan yang bekerja di antara aktor-aktor sosial (warga, kelompok, organisasi, dan elite) yang saling memengaruhi arah keputusan kolektif. Penitikberatan ini penting karena kekuasaan tidak selalu hadir sebagai “jabatan”, melainkan sebagai kemampuan mengatur, membujuk, menekan, atau membatasi pilihan pihak lain.

Konsep-konsep seperti negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, hingga alokasi sebagai inti pembahasan ilmu politik, yang menunjukkan sejak awal disiplin ini memusatkan perhatian pada bagaimana keputusan dibuat dan siapa diuntungkan olehnya (Budiardjo, 2001). Politik, dalam arti itu, menjadi cara masyarakat memproduksi keteraturan sekaligus ruang kontestasi yang

terus bergerak. Tradisi ilmu sosial lalu mendorong pembacaan yang menautkan fakta kelembagaan dengan dinamika sosial yang menopang atau menantanginya.

Perluasan objek kajian terjadi karena ilmu politik tidak menganggap negara sebagai satu-satunya arena politik, melainkan sebagai salah satu simpul dari jaringan kekuasaan yang lebih luas. Ilmu politik perlu untuk dipahami melalui konsep-konsep dasar dan keterkaitannya dengan fenomena sosial, sehingga dapat menjelaskan proses-proses yang membentuk tindakan kolektif, bukan hanya sekedar memotret struktur formal (Surbakti, 1992). Cara pandang ini membuat ilmu politik dekat dengan sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi sosial, sebab semua disiplin itu sama-sama menelaah perilaku manusia dalam struktur dan relasi sosial.

Batas kajian menjadi lebih terbuka ketika perhatian diarahkan pada bagaimana kekuasaan dijalankan melalui jaringan, norma, dan distribusi sumber daya. Secara ontologis, objek kajian ilmu politik sebagai yaitu peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan politik dan bagaimana ilmu politik dibangun untuk menjelaskannya. Pada titik ini, objek ilmu politik memperoleh bentuknya sebagai kajian tentang kuasa, keputusan, dan keteraturan sosial (Rismawati, 2022).

Dalam tradisi ilmu sosial, kekuasaan dipahami sebagai relasi yang tidak selalu berpusat pada negara dan tidak selalu mudah diukur melalui keputusan formal. Michel Foucault menekankan kekuasaan sebagai sesuatu yang hadir dalam relasi, tersebar, dan berkelindan dengan pengetahuan serta wacana (Af., 2012). Implikasinya, objek kajian ilmu politik mencakup cara bagaimana “kebenaran” diproduksi dan dipakai untuk membenarkan kebijakan, menertibkan populasi, atau mendisiplinkan perilaku. Pendekatan ini memperkaya pembacaan dinamika kekuasaan karena membuka ruang untuk meneliti politik pada level praktik sehari-hari, bahasa, simbol, dan perangkat administratif. Kekuasaan dapat bekerja melalui regulasi,

melalui pembaruan pendanaan partai, misalnya, bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya strategis untuk mengurangi ketergantungan partai pada donatur besar. Tanpa intervensi ini, konsentrasi kekayaan dengan mudah bertransformasi menjadi konsentrasi kuasa politik (Syawawi, 2021). Pendekatan ini mengajak agar demokrasi dilihat bukan hanya sebagai prosedur, melainkan sebagai konfigurasi relasi sosial yang ditentukan oleh distribusi sumber daya dan kapasitas pengorganisasian kepentingan.

Dinamika ini kian kompleks seiring digitalisasi ruang publik, di mana arus informasi menjadi arena kontestasi yang menentukan. Algoritma platform dan logika keterlibatan (engagement) kini memengaruhi isu apa yang menonjol dan emosi apa yang dimobilisasi. Realitas ini melahirkan medan tempur baru berupa disinformasi politik dan propaganda digital yang dikelola secara industrial, bukan lagi sekadar aktivitas spontan warga. Dalam kerangka ilmu politik, fenomena ini memperluas definisi kekuasaan dari sekadar kontrol atas institusi menjadi kontrol atas infrastruktur informasi dan jaringan produksi opini (Azwar et al., 2022).

Konsekuensinya, terjadi penguatan polarisasi dan politik identitas yang menyempitkan ruang kompromi. Strategi mobilisasi berbasis identitas, yang sering kali berkelindan dengan hoaks, tidak hanya memicu ketegangan sosial tetapi juga merusak konsolidasi demokrasi. Pada tingkat lokal, institusi pengawas pemilu menghadapi tantangan berat saat kapasitas literasi digital publik belum merata sementara konten manipulatif bergerak sangat cepat (Erinaldi, 2024). Ilmu politik sangat dibutuhkan di sini untuk membedakan antara kontestasi yang sehat dan konflik yang merusak prasyarat demokrasi, karena polarisasi pada akhirnya akan mengikis kepercayaan publik pada institusi dan melumpuhkan kerja sama kebijakan.

Pada akhirnya, tantangan terbesar negara dan masyarakat sipil adalah mencegah kemunduran demokrasi tanpa mengorbankan

stabilitas pemerintahan. Fenomena seperti populisme, oligarki, dan disinformasi berbasis AI menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak pernah netral; ia dapat menekan biaya manipulasi dan memperluas jangkauannya secara masif. Ilmu politik berperan menghubungkan gejala-gejala kontemporer ini dengan mekanisme yang terukur. Dengan kerangka pikir demikian maka modernitas dapat dilihat bukan sebagai era yang terputus dari masa lalu, melainkan sebagai transformasi medium yang membuat kerja kekuasaan menjadi semakin kompleks dan berlapis.

Referensi

- Af., A. K. (2012). Konsep Kekuasaan Michel Foucault. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 131–149.
- Amin, R., Muhammad, S., & Muhammad, R. (2019). Pilkada yang Membelah Media (Relasi Kuasa di Balik Kontestasi Wacana Pilgub Sulsel 2018). *Hasanuddin Journal of Sociology*, 1(1), 43–55.
- Azwar, Sarwoprasodjo, S., Soetarto, E., & Lubis, D. P. (2022). Tindakan Komunikatif Komunitas Virtual untuk Mengurangi Disinformasi Pemberitaan Politik di Media Sosial. *Jurnal Wacana Politik*, 7(2), 157–168.
- Budiardjo, M. (2001). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Elfira, D. G., Hanani, S., Syafitri, A., Akhyar, M., & Harahap, N. I. Y. (2023). Teori Karl Marx dan Redistribusi Sumber Daya Pendidikan: Meninjau Manajemen Pendidikan yang Berorientasi Keadilan Sosial. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 2(1), 197–209.
- Erinaldi. (2024). Politik Identitas dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi. *JIAN: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2), 1–13.

- Firzatullah, M. A., Prayogi, A., Nashah, S. D., & Rosidah, N. (2026). The Islamization of Science: The Intellectual Response of Indonesian Muslims to the Integration of Religion and Science in the Millennial Era. *Averroes: Journal for Science and Religious Studies*, 3(1), 1-19.
- Friel, D. (2017). Understanding institutions: Different Paradigms, Different Conclusions. *Revista de Administração*, 52(2), 212–214.
- Gamurti, I., & Siregar, L. H. (2021). Ruang Lingkup Ilmu Politik dan Negara. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(1), 33–37.
- Gandhi, D. (2006). Rational Choice Theory In Political Science: Interesting, But Flawed In Implementation. *SSRN Electronic Journal*.
- Herfeld, C. (2022). Revisiting the Criticisms of Rational Choice Theories. *Philosophy Compass*, 17(1), e12774.
- Ikponmwosa, M. E., Omodia, S. M., & EfanodorObeten, H. O. (2024). An Analysis of The Use of Quantitative Methods in Political Science Research. *EDSU Journal of Politics and Administrative Studies (EJPAS)*, 1(2), 18–26.
- Kosandi, M. (2015). Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014. *Jurnal Politik*, 1(1), 125–154.
- Krupavicius, A., Isoda, V., & Vaisnoras, T. (2021). *Pengantar Studi Perbandingan Politik* (M. S. Nasrulloh, Trans.). Nuansa Cendekia.
- Madung, O. G. (2016). Korupsi, Patronase, dan Demokrasi. *Jurnal Ledalero*, 15(1), 11.
- Marsh, D., & Stoker, G. (2018). *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik* (H. Mahadi & Shohifullah, Trans.). Penerbit Nusa Media.
- Masruroh, A. (Ed.). (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan

- bagi Sosiologi Politik. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 18(1), 75–100.
- Muhajir, A., & Wulandari, F. (2023). Demokrasi Oligarkis dan Resesi Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah Tinjauan Sejarah Politik. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 4(1), 1–10.
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). Membaca Sejarah dalam Membangun Negara: Perspektif Historis dalam Reformasi Administrasi Publik. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 3(2), 67-78.
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). The Concept of Conflict and the Theory of Social Conflict in Karl Marx's Thought. *JURNAL SINORA*, 1(1), 1–11.
- Prayogi, A., & Nasrullah, R. (2026). Pengaruh Filsafat Positivistik dalam Ilmu Sejarah: Suatu Telaah. *Titikala Jurnal*, 2(1), 1-15.
- Ramadhani, Y. (2020). Pengetahuan dan Kekuasaan Menurut Michel Foucault dan Analisis Wacana Pendidikan. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan*, 8(2).
- Razak, A. & Elyta. (2018). *Ekonomi Politik Antara Teori dan Praktek*. Top Indonesia.
- Rismawati, N. (2022). *Pengantar Ilmu Politik*. Widina Bhakti Persada.
- Sagena, U., Lawelai, H., Dema, H., Sundari, Hardianti, & Irawati. (2023). *Metode Penelitian Sub Rumpun Ilmu Politik (Teori & Referensi berbasis Studi Kasus)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Setiawan, I., Ibrahim, & Ranto. (2022). Patronase dan Klientalisme Politik (Studi Pada Masyarakat Daerah Pemilihan I, Kabupaten Bangka di Pemilihan Legislatif 2019). *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1255–1262.
- Setiyono, B. (2024). *Pengantar Ilmu Politik*. PT. Bumi Aksara.
- Siswati, E. (2018). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 5(1), 11–

33.

- Sobari, W. (2024). *Analisis Institusionalisme Baru dalam Ilmu Politik*. Penerbit Lakeisha.
- Suhartana, G. M. (2016). Kajian Politik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 2(2), 117–122.
- Sulistyo, Z. P., Sofi, K., Hafidz, R. T., & Prayogi, A. (2025). Sains Religius dan Agama Saintifik: Kerangka Harmonisasi untuk Membangun Masyarakat Humanis, Moderat dan Harmonis. *Jurnal Studi dan Pendidikan Agama Islam*, 4(03).
- Supriyadi. (2015). Analisis Wacana Kritis: Konsep dan Fungsinya bagi Masyarakat. *AKSARA: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 16(2).
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syawawi, R. (2021). Memutus Oligarki dan Klientelisme dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik oleh Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 139–152.
- Tohardi, A. (2020). Model Penelitian Kebijakan Kualitatif "Tohardi". *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1(1), 58–77.
- Varma, S. P. (2007). *Teori Politik Modern* (M. T. Effendi, Ed.). Raja Grafindo Persada.

KONSEP KEKUASAAN DALAM POLITIK

Oleh: Pirma Windra, S.I.P., M.I.P.

2.1. Pendahuluan

Kekuasaan merupakan konsep fundamental dalam kajian ilmu politik karena hampir seluruh proses politik—mulai dari perumusan kebijakan, distribusi sumber daya, hingga pengambilan keputusan publik—tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan yang melingkupinya. Politik pada hakikatnya berkaitan dengan siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana (Lasswell, 1936), yang secara implisit menunjukkan adanya kapasitas aktor tertentu untuk memengaruhi perilaku, preferensi, dan pilihan aktor lain dalam suatu sistem politik. Dalam konteks ini, kekuasaan menjadi instrumen utama yang memungkinkan terjadinya pengaturan, pengendalian, dan legitimasi dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

Dalam kajian ilmiah, kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak melalui sarana koersif, tetapi juga sebagai proses yang membentuk struktur sosial dan pola interaksi politik. Weber (1947) mendefinisikan kekuasaan sebagai probabilitas seorang aktor untuk merealisasikan kehendaknya

meskipun menghadapi resistensi, yang menunjukkan dimensi konflik dalam relasi kekuasaan. Sementara itu, Dahl (1957) menekankan aspek relasional kekuasaan sebagai kemampuan A untuk membuat B melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan tanpa intervensi A. Pandangan ini menegaskan bahwa kekuasaan selalu beroperasi dalam hubungan sosial yang dinamis.

Perkembangan teori politik modern memperluas pemahaman tentang kekuasaan sebagai fenomena multidimensional. Lukes (2005) mengemukakan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui pengambilan keputusan yang terlihat, tetapi juga melalui pengendalian agenda dan pembentukan kesadaran politik masyarakat. Lebih lanjut, Foucault (1980) memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang tersebar dalam jaringan sosial dan terinternalisasi dalam wacana, norma, serta praktik kelembagaan. Dengan demikian, kekuasaan tidak selalu terpusat pada institusi formal, melainkan juga hadir dalam relasi sosial sehari-hari.

Berdasarkan perspektif tersebut, pemahaman mengenai konsep kekuasaan menjadi sangat penting untuk menganalisis dinamika politik secara komprehensif. Kajian tentang kekuasaan memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana kepentingan dikonstruksikan, bagaimana kebijakan dibentuk, serta bagaimana legitimasi politik dipertahankan. Oleh karena itu, studi mengenai kekuasaan merupakan fondasi teoritis yang esensial dalam pengembangan ilmu politik kontemporer.

2.2. Pengertian Kekuasaan dalam Perspektif Ilmu Politik

Dalam perspektif ilmu politik, kekuasaan (*power*) dipahami sebagai konsep sentral yang menjelaskan kemampuan individu atau kelompok untuk memengaruhi perilaku, sikap, dan keputusan pihak lain dalam suatu sistem sosial dan politik. Secara umum, kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kapasitas untuk mengarahkan tindakan

- transformations: Politics, economics and culture*. Polity Press.
- Lasswell, H. D. (1936). *Politics: Who gets what, when, how*. McGraw-Hill.
- Lukes, S. (2005). *Power: A radical view* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Mills, C. W. (1956). *The power elite*. Oxford University Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah. (2010). *Mengelola partai politik: Komunikasi dan positioning ideologi politik di era demokrasi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Huntington, S. P. (1991). *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. University of Oklahoma Press.
- Nugroho, R. (2014). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Prasetyo, A. G., & Kurniawan, R. C. (2018). Kekuasaan dan kebijakan publik dalam perspektif politik lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 115–128.
- Santoso, P. (2015). Kekuasaan dan legitimasi dalam sistem politik Indonesia. *Jurnal Politik*, 1(1), 45–62.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.

NEGARA DAN KEDAULATAN

Oleh: Muhammad Akbar Maulana, S.I.P., M.I.P.

Bab ini membahas konsep negara dan kedaulatan dalam perspektif ilmu politik dengan pendekatan teoretis dan empiris yang komprehensif. Fokus pembahasan meliputi pengertian negara dari berbagai perspektif teoretis, unsur-unsur konstitutif dan deklaratif negara, teori-teori kedaulatan dari klasik hingga kontemporer, serta dinamika kedaulatan dalam konteks globalisasi dan tata kelola global. Analisis menggabungkan pemikiran tokoh-tokoh klasik seperti Jean Bodin, Thomas Hobbes, dan Hans Kelsen dengan perkembangan konsep negara modern dan tantangan kedaulatan di era kontemporer. Pembahasan juga mengeksplorasi implementasi konsep negara dan kedaulatan dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, termasuk analisis terhadap konstitusi, sistem pemerintahan, dan mekanisme *checks and balances* dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.1. Pendahuluan

Negara merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian ilmu politik yang telah menjadi objek perdebatan filosofis, juridis, dan sosiologis sejak zaman Yunani Kuno hingga era modern. Sebagai

bentuk organisasi politik tertinggi dalam masyarakat, negara memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya, yakni kepemilikan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi yang sah dalam wilayah tertentu. Konsep negara tidak dapat dipisahkan dari konsep kedaulatan, karena kedaulatan merupakan atribut esensial yang mendefinisikan eksistensi dan legitimasi negara dalam sistem politik domestik maupun internasional.

Dalam perkembangan sejarah pemikiran politik, konsep negara telah mengalami evolusi yang signifikan. Aristoteles dalam karya monumentalnya *Politika* memandang negara (*polis*) sebagai komunitas politik tertinggi yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang baik (*eudaimonia*) bagi warga negaranya. Pandangan ini menekankan dimensi etis dan teleologis dari negara, di mana negara bukan sekadar instrumen kekuasaan melainkan wadah untuk mewujudkan kebajikan dan keadilan. Namun, pemahaman modern tentang negara mengalami transformasi fundamental pada abad ke-16 dan ke-17, ketika pemikir-pemikir seperti Niccolò Machiavelli, Jean Bodin, dan Thomas Hobbes mulai mengonseptualisasikan negara sebagai entitas politik yang terpisah dari dimensi moral dan agama.

Machiavelli dalam *Il Principe* (1532) memperkenalkan konsep negara sebagai struktur kekuasaan yang otonom, terlepas dari pertimbangan moral tradisional. Ia menekankan bahwa stabilitas dan keberlangsungan negara (*ragion di stato*) merupakan tujuan utama yang dapat membenarkan berbagai cara untuk mencapainya. Pendekatan realis Machiavelli ini menandai babak baru dalam pemikiran politik, di mana negara dipahami sebagai arena persaingan kekuasaan yang memerlukan strategi politik yang rasional dan pragmatis, bukan sekadar idealisme moral atau teologis.

Konsep kedaulatan sebagai atribut esensial negara pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Jean Bodin dalam *Six Books of the Commonwealth* (1576). Bodin mendefinisikan kedaulatan sebagai

kekuasaan tertinggi dan absolut yang dimiliki oleh negara untuk membuat dan menegakkan hukum tanpa dibatasi oleh kekuatan eksternal manapun. Menurut Bodin, kedaulatan bersifat tunggal, bulat, tidak terbagi, dan abadi. Pemikiran Bodin ini muncul dalam konteks perang agama di Prancis, di mana ia melihat perlunya kekuasaan pusat yang kuat untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Konsep kedaulatan Bodin kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan teori negara modern dan sistem negara-bangsa (nation-state) yang mendominasi tatanan politik internasional hingga saat ini.

Thomas Hobbes dalam *Leviathan* (1651) mengembangkan teori kontrak sosial yang memberikan legitimasi rasional bagi kekuasaan negara. Menurut Hobbes, dalam kondisi alamiah (*state of nature*) manusia hidup dalam keadaan perang semua melawan semua (*bellum omnium contra omnes*), di mana kehidupan manusia bersifat *solitary, poor, nasty, brutish, and short*. Untuk keluar dari kondisi ini, manusia membuat kontrak sosial dengan menyerahkan seluruh hak-hak alamiahnya kepada penguasa absolut (*sovereign*) yang memiliki kekuasaan tak terbatas untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Teori Hobbes ini memberikan justifikasi teoretis bagi konsep kedaulatan absolut dan menggarisbawahi fungsi negara sebagai penjamin keamanan dan ketertiban sosial.

Dalam konteks hukum internasional, konsep negara dan kedaulatan mendapat pengakuan formal melalui Perjanjian Westphalia (1648) yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa. Perjanjian ini menetapkan prinsip-prinsip dasar sistem negara-bangsa modern, yaitu kedaulatan teritorial, persamaan kedaulatan antar negara, dan non-intervensi dalam urusan domestik negara lain. Sistem Westphalian ini menjadi pilar utama tatanan politik internasional selama berabad-abad, meskipun mengalami berbagai tantangan dan transformasi seiring dengan perkembangan globalisasi,

interdependensi ekonomi, dan munculnya isu-isu transnasional seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan terorisme internasional.

Studi tentang negara dan kedaulatan memiliki relevansi yang sangat penting dalam memahami dinamika politik kontemporer, baik di tingkat domestik maupun internasional. Di era globalisasi, konsep kedaulatan negara menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari integrasi ekonomi regional, rezim hukum internasional yang semakin mengikat, hingga proliferasi aktor-aktor non-negara yang berpengaruh dalam politik global. Fenomena seperti Uni Eropa, Mahkamah Pidana Internasional, dan intervensi kemanusiaan mempertanyakan kembali konsep kedaulatan absolut yang dikemukakan oleh Bodin dan Hobbes. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang evolusi konsep negara dan kedaulatan menjadi krusial untuk menganalisis dan merespons berbagai persoalan politik global yang semakin kompleks dan saling terkait.

Bab ini akan mengeksplorasi berbagai dimensi konsep negara dan kedaulatan secara komprehensif, mulai dari fondasi teoretis klasik hingga perkembangan kontemporer. Pembahasan akan mencakup pengertian negara dari berbagai perspektif teoretis, unsur-unsur pembentuk negara, teori-teori kedaulatan, tipologi negara dan sistem pemerintahan, serta dinamika kedaulatan dalam konteks global. Analisis akan diperkaya dengan studi kasus implementasi konsep negara dan kedaulatan di Indonesia, termasuk perkembangan ketatanegaraan pasca-reformasi dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan nasional di tengah arus globalisasi. Melalui pendekatan yang sistematis dan kritis, bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang salah satu konsep paling fundamental dalam ilmu politik.

3.2. Konsep dan Pengertian Negara

- Rousseau, Jean-Jacques. (1997). *The Social Contract and Other Later Political Writings* (Terjemahan Victor Gourevitch). Cambridge: Cambridge University Press.
- Siahaan, Maruarar. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Strong, C.F. (1966). *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form* (8th ed.). London: Sidgwick & Jackson.
- Suny, Ismail. (1985). *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tata Negara*. Jakarta: Aksara Baru.
- United Nations. (1933). *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*. League of Nations Treaty Series, Vol. 165.
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Montego Bay: United Nations.
- United Nations. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. The Hague: International Criminal Court.
- United Nations. (2005). *World Summit Outcome Document: Responsibility to Protect*. New York: United Nations General Assembly.
- Weber, Max. (1946). *Politics as a Vocation*. Dalam H.H. Gerth & C. Wright Mills (Eds.), *From Max Weber: Essays in Sociology* (pp. 77-128). New York: Oxford University Press.
- Wheare, Kenneth C. (1963). *Federal Government* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Yamin, Muhammad. (1971). *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zoelva, Hamdan. (2014). *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

SISTEM POLITIK DAN STRUKTUR KEKUASAAN

Oleh: Apasas Saputra, S.A.P., M.A.P.

4.1. Konsep dan Pengertian Sistem Politik

1. Definisi Sistem Politik

Sistem politik merupakan tatanan cara yang mengatur seluruh proses kegiatan politik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan implementasi kegiatan politik. Menurut Gabirel Almond (1974) Sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat bebas dan merdeka untuk melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakat ataupun berhadap-hadapan dengan masyarakat lainnya) melalui penggunaan paksaan fisik yang absah. Sistem politik diartikan sebagai rangkaian kegiatan komunikasi mengenai proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang bersifat mengikat dalam suatu masyarakat.

David Easton (1957) mendefinisikan sistem politik sebagai proses alokasi nilai-nilai secara otoritatif bagi masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa politik berkaitan erat dengan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Dalam konteks yang lebih luas, sistem politik mencakup: 1. Lembaga politik formal, seperti eksekutif,

legislatif, dan yudikatif, 2. Aktor politik, baik negara maupun non-negara, 3. Proses politik, termasuk pemilu, pembuatan kebijakan, dan pengambilan keputusan, 4. Lingkungan politik, yang meliputi faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

Dengan demikian, sistem politik bukanlah entitas yang statis, melainkan sebuah sistem terbuka yang terus berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem politik sangat berguna bagi seluruh masyarakat. Melalui sistem politik, masyarakat dapat melihat seluruh proses kegiatan politik. Sesuai dengan prinsip demokrasi bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan bentuk transparansi kepada publik dalam hal ini masyarakat. Sederhananya, sistem politik dijadikan sebagai mekanisme bagaimana suatu masyarakat diatur dan dijalankan, seperti demokrasi, monarki, atau otoritarianisme.

2. Pendekatan Sistem dalam Ilmu Politik

Pendekatan sistem dalam ilmu politik berkaitan dengan seluruh proses mekanisme yang memiliki keterikatan. Semua proses tersebut dimulai dari *input* (masukan), *Proccess* (pengolahan), hingga *Output* (keluaran). Menurut David Easton (1957) bahwa proses kegiatan input (masukan) diawali dari keinginan dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Semua bentuk keinginan dan kebutuhan masyarakat bersumber dari janji-janji pemerintahan ketika melakukan kampanye politik. Dapat diartikan bahwa pada proses input ini masyarakat menagih seluruh janji yang dilontarkan oleh pemerintah. Berdasarkan "prinsip demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat" bahwa sudah seharusnya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat.

Setelah adanya masukan (*input*) dari masyarakat, timbulnya proses dari pelaksanaan dari masukan tersebut. Kegiatan proses disini diartikan sebagai konversi dari pemerintah yang berupa proses pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan diartikan sebagai penyeleksian kebijakan mana yang cocok dilaksanakan berdasarkan tuntutan masyarakat. Berdasarkan tahapan kebijakan publik terdapat

lima tahapan, yaitu: 1. Identifikasi masalah, yang berisikan tuntutan masyarakat mengenai keinginan dan kebutuhannya. 2. Formulasi kebijakan, yang berisikan pengembangan alternatif solusi dan opsi mengenai tuntutan masyarakat, 3. Legitimasi kebijakan, yang berisikan proses pengesahan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga legislatif dalam hal ini pemerintah.

Setelah melewati mekanisme *input* (masukan), proses (pengolahan) maka selanjutnya pada mekanisme *ouput* (hasil atau keluaran). Pada mekanisme ini berupa hasil atau bukti dari tuntutan masyarakat. Seluruh tuntutan yang dilontarkan masyarakat akan dijawab oleh pemerintah melalui tahapan ini. Masih berkaitan dengan tahapan kebijakan publik, maka tahapan output berisikan implementasi kebijakan. Proses implementasi kebijakan berupa pelaksanaan kebijakan atas dasar kebutuhan masyarakat. Sebagai contohnya proses kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini hadir berdasarkan tuntutan masyarakat yang menginginkan untuk meningkatkan pertumbuhan gizi masyarakat. Tingginya angka stunting menjadi alasan kenapa masyarakat memerlukan pertumbuhan gizi terutama bagi anak-anak. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pemerintah mengeluarkan output (hasil/keluaran) yang berupa Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, Pendekatan sistem politik dapat diartikan sebagai proses penting untuk Memahami stabilitas dan perubahan politik menjelaskan hubungan antara negara dan masyarakat Menganalisis respons sistem politik terhadap krisis dan tekanan eksternal. Namun demikian, pendekatan sistem juga mendapat kritik karena cenderung mengabaikan konflik, dominasi, dan ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat.

3. Tipologi Sistem Politik

Tipologi sistem politik merupakan klasifikasi atau pengelompokan sistem politik berdasarkan karakteristik tertentu, seperti distribusi kekuasaan, pola hubungan antara pemerintah dan

masyarakat, serta mekanisme pengambilan keputusan. Tipologi ini penting dalam kajian ilmu politik karena membantu memahami bagaimana suatu negara menjalankan pemerintahan dan mengelola kekuasaan.

a. Sistem Politik Demokratis

Sistem politik demokratis ditandai oleh partisipasi masyarakat yang luas, kompetisi politik yang terbuka, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik (Dahl, 1961). Kekuasaan dalam sistem ini dibatasi oleh hukum dan diawasi melalui mekanisme checks and balances. Ciri utama sistem politik demokratis berupa Pemilu yang bebas dan adil, Supremasi hukum, Kebebasan berserikat dan berpendapat, Akuntabilitas kekuasaan.

Dalam praktiknya, demokrasi juga menghadapi tantangan berupa oligarki politik, dominasi elite, dan pengaruh modal dalam proses politik. Seluruh tantangan tersebut menjadi catatan yang bersifat mendesak bagi pemerintah untuk mengatasi tantangan dalam sistem politik birokrasi. Meningkatkan proses penegakan hukum menjadi kunci mengatasi tantangan sistem politik demokrasi. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa melihat pangkat dan golongan.

b. Sistem Politik Otoriter

Sistem politik otoriter dicirikan oleh pemusatan kekuasaan pada satu aktor atau kelompok tertentu. Partisipasi politik masyarakat dibatasi, dan oposisi politik sering kali ditekan (Dahl, 1961). Ciri-ciri utama dalam sistem politik otoriter berupa Kekuasaan bersifat hierarkis, Kontrol negara terhadap masyarakat sangat kuat, Legitimasi sering dibangun melalui stabilitas dan keamanan. Meskipun demikian, sistem otoriter dapat menghasilkan stabilitas jangka pendek, sistem politik otoriter rentan terhadap krisis legitimasi dan konflik politik laten.

sistem politik modern. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dan ruang partisipasi politik, sehingga menuntut pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel. Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem politik sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan, serta memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Referensi

- Almond, Gabriel. (1974). *The Study of Comparative Politics*. Dalam *Comparative Politics Today*.
- David, Easton. (1957). *An Approach to the Analysis of Political Systems*. Dalam *World Politics*. Volume IX. No 3
- Dahl, R. A. (1961). *Who Governs? Democracy and Power in an American City*. Yale University Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected interviews and other Writings 1972–1977*. Pantheon Books.
- Heywood, A. (2013). *Politics* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Lukes, S. (2005). *Power: A Radical View* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Mills, C. W. (1956). *The Power Elite*. Oxford University Press.
- Mosca, G. (1939). *The Ruling Class*. McGraw-Hill.
- Parsons, T. (1963). On the Concept of Political Power. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 107(3), 232–262.
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Harper & Brothers.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.

IDEOLOGI POLITIK DAN PENGARUHNYA

Oleh: Kharis Kurnia, S.E., M.Si.

5.1. Pendahuluan: Mengapa Ideologi Penting?

Pernahkah kita bertanya, mengapa dua negara dengan kekayaan alam yang serupa, tingkat pendidikan yang tidak jauh berbeda dan sejarah yang beririsan, justru mengembangkan kebijakan ekonomi dan sosial yang sangat bertolak belakang? Misalnya, satu negara mengadopsi pasar bebas secara agresif dengan privatisasi aset-aset negara, sementara negara lainnya justru memperkuat peran negara dalam mengendalikan sumber daya vital dan mendistribusikan kembali kekayaan kepada rakyatnya. Jawaban atas pertanyaan ini tidak semata-mata terletak pada faktor ekonomi atau geografis, melainkan sering kali bersarang jauh di dalam sebuah kerangka pemikiran yang mendasari tindakan pemerintah yaitu, ideologi politik.

Ideologi berfungsi seperti sepasang kacamata yang memengaruhi cara para pemimpin, dan bahkan masyarakat luas, melihat dunia dan merumuskan solusi atas berbagai masalah. Ideologi menyediakan sebuah peta, tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur, apa tujuan yang harus dicapai, dan cara-cara yang sah untuk

mewujudkannya. Tanpa menyadari ideologi yang mendasari kebijakan, kita hanya akan melihat permukaan dari keputusan politik tanpa memahami alasan "mengapa" di baliknya. Oleh karena itu, memahami ideologi bukan sekadar latihan akademis, melainkan sebuah alat penting untuk mengurai kompleksitas tatanan global dan nasional.

Dalam bab ini, penulis akan mengajak pembaca untuk melakukan perjalanan sistematis ke dalam dunia ideologi politik. Ruang lingkup bahasan akan dimulai dari titik paling mendasar, mengupas konsep dan definisi ideologi itu sendiri, menelusuri sejarah dan evolusi maknanya dari awal kemunculannya hingga saat ini. Selanjutnya, bab ini akan memetakan berbagai jenis ideologi politik utama yang telah membentuk wajah dunia modern, mulai dari liberalisme, konservatisme, hingga sosialisme, serta tidak lupa membahas ideologi-ideologi yang muncul kemudian seperti feminisme dan environmentalisme. Pada puncaknya, pembahasan akan fokus pada mekanisme pengaruh ideologi, bagaimana sekumpulan gagasan abstrak ini mampu membentuk identitas individu, menggerakkan partai politik dan gerakan sosial, dan pada akhirnya menentukan arah kebijakan sebuah negara.

5.2. Konsep dan Definisi Ideologi Politik

Setelah memahami urgensi ideologi dalam membentuk tatanan sosial dan politik, langkah selanjutnya adalah menggali lebih dalam mengenai konsep dan definisi itu sendiri. Istilah "ideologi" memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dengan makna yang berubah seiring waktu. Untuk memahaminya secara utuh, kita perlu menelusuri asal-usulnya, membedah beragam definisi yang ada, dan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik fundamental yang membedakannya dari sekadar kumpulan opini.

1. Etimologi dan Asal-Usul

Secara etimologis, kata "ideologi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *idea* yang berarti "gagasan" atau "konsep", dan *logos* yang berarti "studi" atau "ilmu". Dengan demikian, secara harfiah, ideologi dapat diartikan sebagai "studi tentang gagasan". Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada akhir abad ke-18 oleh seorang filsuf Prancis, *Antoine Destutt de Tracy*, dan kelompoknya yang dikenal sebagai *Les Idéologues*. Mereka yang hidup di tengah gejolak Revolusi Prancis bercita-cita untuk menciptakan sebuah ilmu pengetahuan yang positif dan empiris tentang ide-ide. Mereka percaya bahwa dengan memahami asal-usul dan fungsi pemikiran manusia, mereka dapat memperbaiki masyarakat, mendirikan sistem pendidikan yang rasional, dan membebaskan manusia dari dogma dan takhayul. Bagi de Tracy, ideologi adalah sebuah disiplin ilmiah yang mulia.

Namun, makna istilah ini segera mengalami degradasi. Napoleon Bonaparte, yang awalnya mendukung *Idéologues*, kemudian memojokkan mereka. Ia menyalahkan mereka atas kegagalan politik dan militer, menganggap mereka sebagai pemimpi yang abstrak dan tidak praktis. Dalam cemoohan Napoleon, "ideologi" menjadi sinonim dari fantasi politik yang tidak realistis dan terputus dari kenyataan. Konotasi negatif inilah yang sebagian besar bertahan dan memengaruhi pemahaman selanjutnya, terutama dalam tradisi Marxis.

2. Beragam Definisi

Perjalanan panjang istilah "ideologi" menghasilkan beragam definisi, yang dapat secara umum dibagi menjadi dua kubu besar, yaitu definisi klasik yang cenderung negatif dan definisi modern yang lebih netral.

3. Definisi Klasik (Marxis)

Pandangan paling berpengaruh mengenai ideologi sebagai konsep negatif datang dari Karl Marx dan Friedrich Engels. Dalam karya

mereka, *The German Ideology* (1846/1970), ideologi dipahami sebagai "kesadaran palsu" (*false consciousness*). Bagi Marx, ideologi bukanlah cerminan netral dari realitas, melainkan sebuah distorsi yang diciptakan oleh kelas penguasa (borjuis) untuk membenarkan dan mempertahankan dominasi mereka. Ideologi berfungsi untuk menyembunyikan kontradiksi dan eksploitasi yang melekat dalam struktur masyarakat kapitalis. Ide-ide yang dominan dalam suatu era adalah ide-ide kelas yang berkuasa. Dengan cara ini, ideologi membuat ketidaksetaraan sosial tampak wajar, alami, dan tak terhindarkan, sehingga kelas yang tertindas (proletar) menerima kondisi mereka tanpa perlawanan. Dalam konteks ini, ideologi adalah alat legitimasi kekuasaan yang menutup-nutupi realitas eksploitasi ekonomi.

4. Definisi Modern Netral

Sebaliknya, ilmu politik modern cenderung mengadopsi definisi yang lebih netral dan deskriptif. Dalam pandangan ini, ideologi didefinisikan sebagai sekumpulan keyakinan, nilai, dan gagasan yang sistematis dan komprehensif tentang bagaimana masyarakat seharusnya bekerja. Definisi ini tidak serta merta menganggap ideologi sebagai sesuatu yang palsu atau manipulatif. Sebaliknya, ideologi dipandang sebagai sebuah kerangka kerja yang diperlukan untuk memahami dunia sosial dan mengusulkan perubahan. Menurut Andrew Heywood (2021), ideologi memberikan "peta" realitas sosial dan "rencana" untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu. Dengan pendekatan ini, semua sistem pemikiran politik, baik liberalisme, konservatisme, sosialisme, maupun nasionalisme, dapat dianalisis sebagai ideologi. Tujuannya bukan untuk menilai mana yang "benar" atau "salah", melainkan untuk memahami bagaimana masing-masing ideologi menginterpretasikan dunia dan menawarkan solusi atas masalah-masalah politik.

5. Karakteristik Utama Ideologi

Untuk mengidentifikasi sebuah ideologi, kita dapat mengenali beberapa karakteristik utama yang melekat padanya:

- a. **Komprehensif:** Ideologi menawarkan sebuah pandangan dunia yang utuh. Ia tidak hanya berfokus pada satu aspek kehidupan, melainkan mencoba menghubungkan berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan moralitas ke dalam satu kerangka yang koheren. Sebagai contoh, liberalisme tidak hanya mendukung pasar bebas (ekonomi), tetapi juga menghubungkannya dengan konsep kebebasan individu (politik) dan hak asasi manusia (moral).
- b. **Normatif:** Ideologi bersifat normatif, bukan sekadar deskriptif. Ia tidak hanya menjelaskan "apa adanya" dunia, tetapi lebih dari itu, ia menawarkan standar tentang apa yang baik dan buruk, apa yang seharusnya dan tidak seharusnya terjadi. Ideologi mengusulkan sebuah visi tentang masyarakat ideal dan menetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai. Misalnya, ideologi lingkungan (environmentalisme) tidak hanya mendeskripsikan kerusakan alam, tetapi juga menormalkan perlunya keberlanjutan dan menentang eksploitasi berlebihan.
- c. **Orientasi Tindakan:** Ideologi pada hakikatnya adalah sebuah program aksi. Ia dirancang untuk mendorong para penganutnya untuk bertindak secara politik guna mewujudkan visinya. Ideologi tidak akan hidup jika hanya tinggal sebagai teori akademis di ruang perpustakaan. Ia menjadi bahan bakar bagi gerakan sosial, platform partai politik, dan justifikasi bagi revolusi atau reformasi. Ia menggerakkan massa dan memobilisasi dukungan untuk perubahan sosial.
- d. **Aksiomatik:** Setiap ideologi dibangun di atas fondasi asumsi atau keyakinan dasar (aksioma) yang tidak perlu dibuktikan lagi. Asumsi ini diterima sebagai kebenaran awal oleh para

- International Publishers. (Karya asli diterbitkan pada 1846).
- Mietzner, M. (2015). Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia. NUS Press.
- Paxton, R. O. (2005). The anatomy of fascism. Vintage Books.
- Sukarno. (1964). Nasakom, kekuatan pemersatu bangsa. Departemen Penerangan RI.
- Tarrow, S. (2011). Power in movement: Social movements and contentious politics (3rd ed.). Cambridge University Press.

DEMOKRASI DAN OLIGARKI

Oleh: Hamzah Jamaludin, S.I.P., M.Sos.

6.1. Pengertian dan Konsep Dasar Demokrasi

Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam perkembangan ilmu politik modern, demokrasi dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang memberikan legitimasi kekuasaan kepada rakyat melalui mekanisme partisipasi dan representasi. Menurut Dahl (1989), demokrasi adalah suatu sistem politik yang ditandai oleh partisipasi luas warga negara dan adanya kompetisi politik yang bebas dan adil. Konsep ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai prosedur pemilihan umum, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin hak-hak politik warga negara. Oleh karena itu, demokrasi memiliki dimensi normatif sekaligus institusional dalam praktik ketatanegaraan.

Secara konseptual, demokrasi modern erat kaitannya dengan prinsip kedaulatan rakyat. Menurut Schumpeter (1942), demokrasi merupakan suatu metode institusional untuk mencapai keputusan politik, di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan

melalui kompetisi dalam memperebutkan suara rakyat. Definisi ini menekankan aspek prosedural demokrasi, khususnya melalui mekanisme pemilihan umum yang kompetitif. Dalam pandangan ini, demokrasi dipahami sebagai suatu sistem yang mengatur proses seleksi pemimpin secara damai dan teratur. Konsep tersebut kemudian berkembang menjadi dasar bagi demokrasi elektoral di berbagai negara. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya berbicara mengenai tujuan pemerintahan, tetapi juga tentang mekanisme dan prosedur dalam menjalankan kekuasaan.

Selain aspek prosedural, demokrasi juga memiliki dimensi substantif yang menekankan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Menurut Held (2006), demokrasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip kebebasan, persamaan politik, dan partisipasi efektif warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Perspektif ini melihat demokrasi sebagai suatu tatanan politik yang menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan akses terhadap informasi. Oleh sebab itu, demokrasi substantif menuntut adanya sistem hukum yang adil serta institusi yang akuntabel. Tanpa jaminan hak-hak dasar tersebut, demokrasi hanya akan menjadi prosedur formal yang kehilangan makna esensialnya. Dengan kata lain, demokrasi harus mampu menciptakan keadilan politik dan sosial bagi seluruh warga negara.

Dalam konteks kelembagaan, demokrasi juga mensyaratkan adanya pembagian kekuasaan dan mekanisme pengawasan. Menurut Montesquieu (1748), pembagian kekuasaan ke dalam cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan prasyarat penting untuk mencegah tirani dan penyalahgunaan kekuasaan. Gagasan ini menjadi fondasi penting dalam sistem demokrasi konstitusional modern. Melalui sistem checks and balances, setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi pengawasan terhadap cabang lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan serta menjamin akuntabilitas pemerintahan.

Dengan demikian, demokrasi tidak hanya bertumpu pada partisipasi rakyat, tetapi juga pada desain institusional yang mencegah konsentrasi kekuasaan.

Lebih lanjut, demokrasi juga berkaitan dengan budaya politik dan tingkat partisipasi masyarakat. Menurut Almond dan Verba (1963), keberhasilan demokrasi sangat dipengaruhi oleh budaya politik partisipatif yang berkembang dalam masyarakat. Budaya politik tersebut mencerminkan sikap warga negara yang aktif, kritis, dan memiliki kesadaran terhadap hak serta kewajiban politiknya. Partisipasi warga negara dalam organisasi politik, diskusi publik, dan pemilihan umum menjadi indikator penting kualitas demokrasi. Tanpa partisipasi yang bermakna, demokrasi akan kehilangan substansinya sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, pembangunan demokrasi tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga kultural.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Menurut Huntington (1991), gelombang demokratisasi yang terjadi di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa demokrasi adalah sistem yang adaptif dan memiliki daya tarik universal. Proses demokratisasi tidak selalu berjalan linear, melainkan sering menghadapi tantangan seperti otoritarianisme dan oligarki. Namun demikian, demokrasi tetap dianggap sebagai sistem yang paling mampu menjamin partisipasi rakyat dan perlindungan hak-hak politik. Dengan demikian, demokrasi dapat dipahami sebagai suatu sistem politik yang menggabungkan prinsip kedaulatan rakyat, mekanisme kompetisi politik, perlindungan hak asasi, serta institusi yang akuntabel. Keseluruhan elemen tersebut membentuk kerangka konseptual demokrasi dalam ilmu politik dan pemerintahan.

6.2. Pengertian dan Konsep Dasar Oligarki

Oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya berada di tangan sekelompok kecil individu atau elite tertentu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oligos* (sedikit) dan *arche* (kekuasaan), yang berarti pemerintahan oleh sedikit orang. Dalam kajian klasik, oligarki sering dipahami sebagai penyimpangan dari bentuk pemerintahan ideal. Menurut Aristoteles (350 SM/1996), oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh kelompok kecil yang berkuasa demi kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan umum. Definisi ini menegaskan bahwa oligarki cenderung berorientasi pada kepentingan elite dan mengabaikan prinsip keadilan distributif dalam kehidupan bernegara.

Dalam perkembangan teori politik modern, oligarki tidak selalu dipahami semata-mata sebagai bentuk pemerintahan formal, tetapi juga sebagai pola distribusi kekuasaan dalam sistem politik. Menurut Michels (1911), dalam setiap organisasi, termasuk yang mengusung prinsip demokrasi, terdapat kecenderungan terbentuknya “hukum besi oligarki” (*iron law of oligarchy*), yaitu dominasi segelintir elite atas mayoritas anggota. Michels menekankan bahwa kompleksitas organisasi dan kebutuhan akan kepemimpinan profesional membuka ruang bagi konsentrasi kekuasaan. Kondisi ini menyebabkan keputusan-keputusan penting sering kali ditentukan oleh kelompok kecil yang memiliki akses terhadap sumber daya dan informasi. Dengan demikian, oligarki dapat muncul bahkan dalam sistem yang secara formal mengklaim dirinya demokratis. Fenomena ini menunjukkan bahwa oligarki lebih merupakan realitas struktural daripada sekadar bentuk pemerintahan normatif.

Selain itu, oligarki juga berkaitan erat dengan faktor ekonomi dan kepemilikan sumber daya. Menurut Winters (2011), oligarki merujuk pada sistem di mana aktor-aktor kaya menggunakan kekayaan mereka untuk mempertahankan dan memperluas

PEMILU, LEGITIMASI, DAN STABILITAS POLITIK

Oleh: Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H.

7.1. Pendahuluan

1. Latar Belakang Pemilu dalam Sistem Politik Modern

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu institusi politik paling fundamental dalam sistem politik modern, khususnya dalam negara-negara yang mengklaim dirinya demokratis. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme formal untuk mentransfer kehendak rakyat ke dalam struktur kekuasaan negara. Dalam konteks ini, pemilu tidak hanya dipahami sebagai prosedur teknis untuk memilih pemimpin, melainkan sebagai institusi politik yang memuat nilai, norma, dan relasi kekuasaan yang kompleks.

Sejak berkembangnya negara-bangsa modern, pemilu menjadi penanda utama perbedaan antara sistem politik demokratis dan non-demokratis. Joseph Schumpeter memandang demokrasi secara minimalis sebagai sebuah metode institusional untuk menghasilkan kepemimpinan politik melalui kompetisi memperoleh suara rakyat. Pandangan ini menempatkan pemilu sebagai inti demokrasi

prosedural, meskipun tidak secara otomatis menjamin pemerintahan yang responsif atau adil.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu mengalami perkembangan signifikan seiring dengan meluasnya hak pilih, meningkatnya partisipasi politik warga negara, dan semakin kompleksnya sistem kepartaian. Data global menunjukkan bahwa pada awal abad ke-20 hanya sebagian kecil negara yang menyelenggarakan pemilu kompetitif dengan hak pilih universal, sementara pada awal abad ke-21 mayoritas negara di dunia telah mengadopsi pemilu sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan, meskipun dengan kualitas yang beragam.

Namun, pemilu modern juga menghadapi paradoks. Di satu sisi, pemilu dipandang sebagai simbol kedaulatan rakyat dan partisipasi politik. Di sisi lain, pemilu sering kali direduksi menjadi rutinitas elektoral yang elitis, mahal, dan sarat manipulasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan pemilu tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya.

2. Pemilu, Kekuasaan, dan Dinamika Demokrasi

Dalam perspektif ilmu politik, pemilu memiliki relasi yang sangat erat dengan kekuasaan. Pemilu merupakan arena utama perebutan kekuasaan yang dilegitimasi secara formal. Melalui pemilu, aktor-aktor politik bersaing untuk memperoleh otoritas yang diakui secara hukum dan sosial. Oleh karena itu, pemilu selalu melibatkan strategi, mobilisasi sumber daya, dan pembentukan wacana politik.

Robert Dahl, melalui konsep poliarki, menekankan bahwa demokrasi modern ditandai oleh dua dimensi utama, yakni partisipasi politik yang luas dan kompetisi yang terbuka. Pemilu menjadi instrumen kunci untuk mewujudkan kedua dimensi tersebut. Namun, Dahl juga mengingatkan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi dapat menghambat terwujudnya kompetisi yang benar-benar setara dalam pemilu.

Dinamika demokrasi elektoral menunjukkan bahwa kekuasaan tidak semata-mata ditentukan oleh suara pemilih, tetapi juga oleh kemampuan elite politik dalam mengendalikan agenda, membentuk opini publik, dan memanfaatkan institusi politik. Antonio Gramsci melalui konsep hegemoni menjelaskan bahwa dominasi politik tidak hanya berlangsung melalui paksaan, tetapi juga melalui persetujuan yang dibangun secara kultural dan ideologis, termasuk dalam proses pemilu.

Perkembangan teknologi informasi telah semakin memperumit relasi antara pemilu dan kekuasaan. Media massa dan media sosial berperan besar dalam membentuk persepsi pemilih, memperkuat identitas politik, sekaligus mempercepat polarisasi. Berbagai studi menunjukkan bahwa disinformasi dan kampanye negatif dapat memengaruhi perilaku memilih serta menurunkan kualitas deliberasi publik dalam demokrasi.

Dalam konteks ini, pemilu menjadi cermin dinamika demokrasi yang lebih luas. Pemilu dapat berfungsi sebagai mekanisme konsolidasi demokrasi ketika diselenggarakan secara jujur dan adil, namun juga dapat menjadi instrumen legitimasi semu ketika dikendalikan oleh elite dan berlangsung dalam kondisi ketimpangan struktural. Oleh karena itu, memahami pemilu sebagai proses politik yang sarat kekuasaan menjadi langkah penting untuk menilai kualitas demokrasi dan stabilitas politik suatu negara.

7.2. Pemilu dalam Perspektif Ilmu Politik

1. Pengertian dan Karakteristik Pemilu

Pemilu dalam kajian ilmu politik dipahami sebagai proses institusional yang teratur untuk memilih pejabat publik melalui partisipasi warga negara yang memenuhi syarat. Definisi ini menekankan dua unsur utama, yakni prosedur yang diatur oleh hukum dan keterlibatan rakyat sebagai sumber kedaulatan. Karena itu, pemilu

selalu terkait erat dengan konstitusi, sistem hukum, dan desain kelembagaan suatu negara.

Secara konseptual, pemilu memiliki beberapa karakteristik pokok, antara lain periodik, kompetitif, inklusif, dan mengikat secara politik. Periodisitas memastikan adanya sirkulasi kekuasaan, sementara kompetisi membuka ruang bagi alternatif kepemimpinan. Inklusivitas berkaitan dengan sejauh mana hak pilih diberikan secara luas tanpa diskriminasi, sedangkan sifat mengikat menjadikan hasil pemilu memiliki konsekuensi hukum dan politik yang nyata.

Samuel P. Huntington menempatkan pemilu sebagai indikator penting modernisasi politik. Menurutnya, stabilitas politik tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat partisipasi, tetapi oleh kemampuan institusi politik termasuk pemilu dalam mengelola partisipasi tersebut secara tertib. Pemilu yang tidak diimbangi dengan institusionalisasi yang kuat justru berpotensi memicu ketegangan politik.

Dalam praktik global, kualitas pemilu sangat beragam. Laporan berbagai lembaga pemantau pemilu internasional menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar negara menyelenggarakan pemilu secara reguler, tidak semuanya memenuhi standar kebebasan dan keadilan. Fenomena ini melahirkan istilah seperti electoral democracy, hybrid regime, hingga electoral authoritarianism untuk menggambarkan variasi praktik pemilu di berbagai sistem politik.

2. Fungsi Pemilu dalam Demokrasi Representatif

Dalam demokrasi representatif, pemilu berfungsi sebagai mekanisme utama pembentukan perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat memilih wakil yang akan duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif untuk menjalankan fungsi pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, pemilu menjadi jembatan antara kehendak rakyat dan kebijakan negara.

Selain fungsi representasi, pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas politik. Teori demokrasi elektoral menekankan bahwa pemilu memungkinkan rakyat untuk memberikan penghargaan atau hukuman kepada penguasa melalui suara mereka. Pemerintah yang gagal memenuhi janji atau kinerja publik berisiko kehilangan kekuasaan dalam pemilu berikutnya.

Anthony Downs, melalui teori pilihan rasional, memandang pemilu sebagai arena pertukaran antara pemilih dan partai politik. Pemilih memberikan suara sebagai imbalan atas kebijakan yang dianggap menguntungkan, sementara partai merancang program untuk memaksimalkan perolehan suara. Perspektif ini membantu menjelaskan perilaku memilih, meskipun sering dikritik karena mengabaikan faktor ideologis dan identitas.

Pemilu juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik. Proses kampanye, debat publik, dan pemberitaan media memperkenalkan nilai-nilai politik, isu kebijakan, serta alternatif kepemimpinan kepada warga negara. Dalam konteks ini, pemilu berkontribusi terhadap pembentukan budaya politik, baik yang bersifat partisipatif maupun pasif.

Namun, fungsi-fungsi ideal tersebut tidak selalu terwujud secara optimal. Tingkat partisipasi pemilih yang rendah, apatisme politik, serta ketidakpercayaan terhadap partai dan politisi menunjukkan adanya krisis representasi di banyak demokrasi modern. Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

3. Pemilu sebagai Arena Kompetisi dan Distribusi Kekuasaan

Dari sudut pandang kekuasaan, pemilu merupakan arena kompetisi politik yang sangat strategis. Aktor-aktor politik berusaha memperoleh dukungan melalui mobilisasi sumber daya ekonomi, jaringan sosial, dan simbol-simbol ideologis. Kompetisi ini tidak

berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dalam struktur ketimpangan yang sering kali menguntungkan elite tertentu.

Teori elite dalam ilmu politik, seperti yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, menyoroti bahwa dalam setiap sistem politik selalu terdapat kelompok kecil yang mendominasi kekuasaan. Pemilu, dalam perspektif ini, tidak menghapus dominasi elite, tetapi mengatur mekanisme sirkulasi elite agar tampak sah dan diterima secara sosial.

Distribusi kekuasaan melalui pemilu juga sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu yang digunakan. Sistem mayoritarian, proporsional, atau campuran memiliki implikasi berbeda terhadap representasi politik dan fragmentasi partai. Misalnya, sistem proporsional cenderung menghasilkan representasi yang lebih inklusif, tetapi juga berpotensi menciptakan fragmentasi politik.

Regulasi pemilu memainkan peran krusial dalam menentukan tingkat keadilan kompetisi. Aturan mengenai ambang batas parlemen, pendanaan kampanye, dan akses media dapat memperkuat atau justru membatasi peluang aktor politik tertentu. Karena itu, desain regulasi pemilu sering menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik.

Dalam banyak kasus, pemilu juga menjadi sarana reproduksi kekuasaan. Incumbent sering memiliki keunggulan struktural, seperti akses terhadap sumber daya negara dan visibilitas publik yang lebih tinggi. Keunggulan ini dapat memengaruhi hasil pemilu dan mengurangi tingkat persaingan yang setara.

Meskipun demikian, pemilu tetap menyediakan peluang bagi perubahan politik. Sejarah politik berbagai negara menunjukkan bahwa pemilu dapat menjadi titik balik penting dalam proses demokratisasi maupun reformasi politik, terutama ketika didukung oleh partisipasi publik yang luas dan tekanan masyarakat sipil.

memperkuat legitimasi kekuasaan, sementara pemilu yang bermasalah berpotensi memicu ketidakpercayaan dan konflik politik.

Stabilitas politik juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas pemilu dan legitimasi yang dihasilkannya. Pemilu dapat menjadi mekanisme penyaluran konflik secara damai, tetapi juga dapat menjadi sumber instabilitas apabila diselenggarakan dalam kondisi ketimpangan, polarisasi, dan lemahnya institusi politik.

Oleh karena itu, pemilu perlu dipahami sebagai bagian dari proses demokrasi yang berkelanjutan. Penguatan institusi pemilu, penegakan aturan yang adil, serta peningkatan kesadaran politik warga menjadi prasyarat agar pemilu dapat berfungsi secara efektif dalam menopang legitimasi kekuasaan dan stabilitas politik. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi prosedur rutin, tetapi fondasi penting bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Referensi

- Dahl, Robert A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Downs, Anthony. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper & Row.
- Easton, David. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley.
- Freedom House. (2023). *Freedom in the World: Marking 50 Years in the Struggle for Democracy*. Washington, DC: Freedom House.
- Fukuyama, Francis. (2018). *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Gramsci, Antonio. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Habermas, Jürgen. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.

- Huntington, Samuel P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.
- International IDEA. (2022). *The Global State of Democracy Report*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Lijphart, Arend. (1999). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press.
- Mosca, Gaetano. (1939). *The Ruling Class*. New York: McGraw-Hill.
- O'Donnell, Guillermo. (1994). Delegative Democracy. *Journal of Democracy*, 5(1), 55–69.
- Schumpeter, Joseph A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & Brothers.
- Transparency International. (2021). *Global Corruption Barometer*. Berlin: Transparency International.
- UNDP. (2020). *Electoral Integrity Initiative: Global Overview*. New York: United Nations Development Programme.
- UNESCO. (2021). *Global Education Monitoring Report: Citizenship Education*. Paris: UNESCO.
- Winters, Jeffrey A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.

KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI INSTRUMEN KEKUASAAN

Oleh: Syarkawi, S.A.P., M.A.P.

8.1. Pendahuluan

Kebijakan publik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk administratif pemerintah, melainkan sebagai hasil interaksi berbagai kepentingan, nilai, dan relasi kekuasaan yang bekerja di dalam sistem politik. Pemerintah memang menjadi aktor formal yang menghasilkan kebijakan, namun proses terbentuknya kebijakan selalu dipengaruhi oleh dinamika politik, tekanan kelompok kepentingan, kepentingan ekonomi, serta tuntutan sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik pada dasarnya merupakan arena kontestasi kepentingan yang mencerminkan siapa yang memiliki akses dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik berperan sebagai instrumen utama pemerintah dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi dan bidang lainnya (Syarkawi, et al, 2025).

Secara klasik, kebijakan publik dipahami sebagai apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam merespons persoalan publik (Dye, 2013). Definisi ini menunjukkan bahwa keputusan pemerintah untuk tidak bertindak pun merupakan bentuk kebijakan yang memiliki konsekuensi politik dan sosial. Dalam konteks ini, kekuasaan terlihat dalam kemampuan aktor tertentu untuk menentukan isu apa yang dianggap penting dan isu mana yang diabaikan. Dengan kata lain, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui keputusan yang dibuat, tetapi juga melalui keputusan yang tidak pernah diambil. Studi kebijakan publik menunjukkan bahwa proses kebijakan sering kali dipengaruhi oleh relasi antara elit politik, birokrasi, dan kepentingan ekonomi tertentu. Agustino (2017) menegaskan bahwa kebijakan publik tidak pernah berada dalam ruang yang netral, karena selalu dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik sering kali menjadi instrumen untuk mempertahankan atau memperluas pengaruh kekuasaan kelompok tertentu dalam struktur pemerintahan.

Selain itu, Nugroho (2018) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk intervensi negara untuk mengatur masyarakat melalui regulasi, program, maupun distribusi sumber daya. Namun, intervensi tersebut tidak selalu mencerminkan kebutuhan masyarakat secara luas. Dalam praktiknya, kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan politik cenderung lebih mampu mempengaruhi arah kebijakan dibandingkan kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi maupun politik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian masalah publik, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan dan pengendalian sosial.

Dari perspektif analisis kebijakan, Dunn (2018) menyatakan bahwa kebijakan publik selalu berkaitan dengan pilihan nilai dan prioritas pembangunan. Artinya, ketika pemerintah memutuskan

untuk memprioritaskan satu sektor pembangunan, maka sektor lain secara tidak langsung akan terpinggirkan. Pilihan tersebut mencerminkan orientasi kekuasaan yang sedang bekerja, termasuk kepentingan politik jangka pendek maupun strategi legitimasi pemerintah di mata publik.

Dalam konteks negara modern, kebijakan publik juga menjadi alat strategis dalam membentuk perilaku masyarakat melalui regulasi, insentif, maupun sanksi. Misalnya, kebijakan subsidi, pajak, atau bantuan sosial tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga mempengaruhi perilaku ekonomi dan politik masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki dimensi kekuasaan yang halus namun efektif, karena bekerja melalui mekanisme administratif yang tampak rasional dan teknokratis.

Oleh karenanya, memahami kebijakan publik sebagai instrumen kekuasaan menuntut pendekatan analisis yang tidak hanya melihat aspek teknis kebijakan, tetapi juga memperhatikan siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, serta bagaimana relasi kekuasaan bekerja dalam setiap tahap proses kebijakan. Pendekatan kritis ini penting agar kebijakan publik tidak hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan publik secara adil dan demokratis.

8.2. Konsep Kebijakan Publik

Secara konseptual, kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan, keputusan, dan strategi yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai bentuk intervensi negara, mulai dari peraturan perundang-undangan, program pembangunan, hingga kebijakan pelayanan publik yang secara langsung memengaruhi kehidupan warga negara. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan keputusan administratif, tetapi juga

menyangkut bagaimana negara menentukan prioritas pembangunan dan mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan publik.

Salah satu definisi paling sering digunakan dalam studi kebijakan publik dikemukakan oleh Dye (2013), yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Definisi ini tampak sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat luas. Pemerintah tidak hanya memproduksi kebijakan melalui tindakan aktif, tetapi juga melalui pilihan untuk tidak mengambil tindakan terhadap suatu masalah. Misalnya, ketika pemerintah memilih untuk tidak mengatur sektor tertentu, keputusan tersebut tetap memiliki dampak terhadap masyarakat dan pasar. Dengan demikian, kebijakan publik selalu memiliki konsekuensi politik dan sosial, baik melalui tindakan maupun pembiaran.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan hasil dari proses politik yang sarat dengan relasi kekuasaan. Tidak semua masalah sosial secara otomatis menjadi agenda kebijakan pemerintah. Banyak persoalan publik yang tidak mendapatkan perhatian karena tidak memiliki dukungan politik atau tidak dianggap strategis oleh pengambil keputusan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan publik tidak bersifat netral, tetapi dipengaruhi oleh kemampuan aktor tertentu dalam menentukan isu mana yang dianggap penting untuk ditangani negara (Agustino, 2017).

Selain itu, kebijakan publik selalu berkaitan dengan dimensi nilai dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai pemerintah. Setiap kebijakan mengandung orientasi tertentu, seperti peningkatan kesejahteraan, stabilitas ekonomi, pemerataan pembangunan, atau pertumbuhan investasi. Pilihan nilai tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan orientasi politik pemerintahan yang sedang berkuasa. Nugroho (2018) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan instrumen negara untuk mengarahkan perilaku masyarakat melalui regulasi, insentif, maupun program

MEDIA, OPINI PUBLIK, DAN KEKUASAAN

Oleh: Muhamad Hanif Fuadi, M.Sos.

9.1. Pendahuluan

Kekuasaan dalam konteks politik kontemporer semakin dipahami sebagai fenomena yang bekerja tidak hanya melalui institusi formal negara atau mekanisme koersif, tetapi juga melalui proses simbolik yang membentuk makna, persepsi, dan legitimasi sosial. Media baik media arus utama maupun platform digital menjadi infrastruktur kunci dalam proses tersebut, karena berperan dalam memproduksi, menyebarkan, dan menormalkan wacana politik. Dalam konteks ini, relasi antara media, opini publik, dan kekuasaan merupakan dimensi fundamental untuk memahami bagaimana politik dijalankan, dipertahankan, dan diperdebatkan dalam masyarakat modern.

Opini publik menempati posisi sentral dalam sistem politik demokratis sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Namun, opini publik tidak terbentuk dalam ruang sosial yang netral atau bebas dari relasi kuasa. Ia merupakan hasil dari proses komunikasi politik yang melibatkan seleksi isu, pembingkaihan makna, distribusi perhatian,

serta interaksi antara aktor politik, media, dan warga. Dengan demikian, opini publik harus dipahami sebagai konstruksi sosial yang bersifat dinamis, dipengaruhi oleh struktur media, kepentingan politik, dan perkembangan teknologi komunikasi.

Bab ini berangkat dari kerangka dinamika kekuasaan yang memandang media sebagai arena relasional, tempat berbagai kepentingan negara, elite politik dan ekonomi, platform teknologi, serta masyarakat sipil yang saling berinteraksi dan berkompetisi. Dalam kerangka tersebut, media tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai aktor politik yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi distribusi kekuasaan simbolik melalui mekanisme seperti agenda setting, framing, priming, dan mediatization. Proses-proses ini menentukan isu apa yang dianggap relevan, perspektif mana yang dilegitimasi, dan batas-batas wacana politik yang dapat diterima dalam ruang publik.

Lebih jauh, perkembangan media digital dan platform algoritmik telah mengubah secara signifikan konfigurasi relasi media, opini publik, dan kekuasaan. Logika personalisasi, ekonomi perhatian, serta konsentrasi kepemilikan platform menghadirkan bentuk-bentuk baru kekuasaan komunikasi yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh kerangka regulasi media tradisional. Kondisi ini memperkuat urgensi analisis kritis terhadap bagaimana kekuasaan beroperasi melalui infrastruktur komunikasi modern, serta bagaimana opini publik dapat berfungsi baik sebagai mekanisme legitimasi demokratis maupun sebagai objek manipulasi politik.

Secara teoretis, bab ini berkontribusi pada pengembangan kajian politik dan dinamika kekuasaan dengan mengintegrasikan analisis struktur media, praktik diskursif, dan transformasi digital dalam satu kerangka konseptual yang koheren. Alih-alih memandang media sekadar sebagai reflektor realitas politik, bab ini menempatkan media sebagai locus utama produksi kekuasaan secara simbolik dan

arena kontestasi wacana. Dengan pendekatan ini, bab ini relevan untuk memahami berbagai konteks politik baik dalam demokrasi mapan, demokrasi hibrid, maupun rezim otoriter tanpa terjebak pada dikotomi sederhana antara kebebasan dan represi.

Sebagai bagian dari buku ajar, pendahuluan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan konseptual bagi pembaca dalam memahami keterkaitan antara media, opini publik, dan kekuasaan sebagai fenomena politik global. Pemahaman ini menjadi prasyarat penting bagi analisis kritis terhadap praktik komunikasi politik kontemporer dan implikasinya bagi kualitas demokrasi serta keberlanjutan kekuasaan politik.

9.2. Media sebagai Instrumen Kekuasaan

Media tidak dapat dipahami sebagai ruang netral yang sekadar menyampaikan informasi dalam konteks politik dan dinamika kekuasaan. Sebaliknya, media merupakan arena strategis tempat kekuasaan diproduksi, dinegosiasikan, dan dilegitimasi. Perspektif teori kelas dominan menempatkan media sebagai instrumen ideologis yang berfungsi mereproduksi kepentingan elite, sekaligus menjaga stabilitas struktur sosial-politik yang menguntungkan kelompok berkuasa (Sallach, 1973; Nazarov, 2022).

Konsep *manufacturing consent* yang dikembangkan Herman dan Chomsky memberikan kerangka analitis penting untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja melalui media. Struktur kepemilikan media, orientasi laba, ketergantungan pada iklan, serta relasi dengan sumber-sumber elite berfungsi sebagai “filter” yang menyaring realitas sosial dan politik. Akibatnya, wacana yang berpotensi mengancam kepentingan kapitalisme, oligarki, atau ketimpangan struktural cenderung dimarjinalkan, sementara kepentingan elite dinormalisasi sebagai kepentingan publik atau “akal sehat” sosial (Nazarov, 2022; Sallach, 1973). Dalam kerangka dinamika kekuasaan,

media mentransformasikan kekuasaan ekonomi menjadi *modal simbolik* yang menopang hegemoni budaya dan ideologis (Bernstein, 1981; Bozbaş, 2025).

Temuan empiris lintas konteks menguatkan argumen tersebut. Studi Schiff (1996) menunjukkan bahwa media tabloid yang menyasar kelas pekerja di Brasil justru menjadi pendukung paling efektif bagi legitimasi kapitalisme dan kontrol elite, bahkan lebih kuat dibandingkan surat kabar “serius” yang relatif membuka ruang alternatif. Pola ini memperlihatkan bagaimana representasi media berperan dalam mengaburkan relasi kuasa, dengan mengecilkan visibilitas kelompok subaltern dan menormalkan citra elite sebagai aktor dominan dan sah secara sosial (Schiff, 1996; Vukčević, 2020; Bozbaş, 2025).

Dalam konteks Indonesia pasca Reformasi 1998, kebebasan pers secara normatif meningkat dan membuka peluang bagi penguatan demokrasi. Namun, dinamika kekuasaan menunjukkan bahwa kebebasan ini berlangsung dalam bayang-bayang oligarki media. Kepemilikan media yang terkonsentrasi pada politisi dan pengusaha menjadikan media sebagai instrumen strategis dalam perebutan jabatan, pembentukan koalisi elite, dan distribusi sumber daya politik (Andrés, 2016; Fadillah & Luo, 2020). Sejumlah studi menegaskan bahwa praktik jurnalisme dan ruang publik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi pemilik media, sehingga fungsi pengawasan terhadap kekuasaan sering kali terdistorsi (Sakina & Hendrik, 2025; Martono, 2025).

Perkembangan media sosial memperluas arena kontestasi kekuasaan sekaligus melahirkan bentuk dominasi baru. Di satu sisi, media sosial memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas, mobilisasi warga, dan pengawasan terhadap negara (Sakina & Hendrik, 2025; Masduki & Wendratama, 2025). Di sisi lain, platform digital beroperasi sebagai mekanisme *quasi-public domination*, di mana

algoritme dan kepentingan korporasi mengatur visibilitas, emosi, dan ekspresi politik warga tanpa akuntabilitas demokratis yang memadai (Aytac, 2022; Qorib, 2025). Fenomena influencer, bot, dan politik performatif menunjukkan bagaimana neoliberalisme beradaptasi dalam ruang digital dengan membungkus dominasi dalam retorika kebebasan dan kreativitas (Coelho, 2025; Dona et al., 2025).

Secara teoretis, subkajian ini berkontribusi pada penguatan perspektif dinamika kekuasaan dengan menegaskan bahwa media merupakan locus utama produksi kekuasaan simbolik. Media tidak hanya berfungsi sebagai instrumen dominasi kelas dominan, tetapi juga sebagai arena perjuangan wacana yang terus diperebutkan. Hasil dari kontestasi tersebut sangat ditentukan oleh konfigurasi relasi ekonomi dan politik, struktur kepemilikan, serta logika teknologi yang melingkupi sistem media kontemporer.

9.3. Opini Publik dalam Politik

Opini publik merupakan elemen sentral yang menghubungkan warga negara dengan kekuasaan politik. Opini publik dipahami sebagai agregasi sikap, persepsi, penilaian, dan emosi warga terhadap isu, aktor, dan kebijakan politik yang terbentuk melalui interaksi sosial serta dimediasi oleh komunikasi politik, terutama melalui media massa dan media sosial. Dalam sistem demokrasi, opini publik tidak hanya mencerminkan kehendak rakyat, tetapi juga menjadi sumber legitimasi utama bagi keberlangsungan kekuasaan dan kebijakan politik.

Dari perspektif dinamika kekuasaan, pembentukan opini publik tidak berlangsung secara spontan atau bebas nilai. Media dan aktor politik berperan aktif dalam mengarahkan perhatian publik, mendefinisikan masalah, serta membingkai realitas politik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa media sosial mempercepat arus informasi politik dan membuka ruang diskusi publik, khususnya di

tingkat lokal dan pedesaan. Proses ini memengaruhi partisipasi pemilu serta pembentukan opini politik warga desa secara cepat dan emosional, sehingga mendekati karakter “opini massa” yang relatif mudah digerakkan melalui framing isu tertentu (Chairunisa et al., 2024; Brutu et al., 2024).

Di sisi lain, pembentukan opini publik juga berlangsung melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan deliberatif. Strategi komunikasi politik pemerintah desa yang mengombinasikan pertemuan tatap muka, pemanfaatan media sosial, dan kampanye sadar politik terbukti meningkatkan transparansi, kepercayaan, serta partisipasi warga (Simbolon & Ivanna, 2024; Silalahi & Ivanna, 2024). Opini publik yang terbentuk melalui forum, organisasi, dan jejaring sosial ini cenderung lebih stabil dan rasional, mencerminkan bentuk “opini kelompok” atau “opini rakyat” yang berakar pada pengalaman kolektif dan interaksi sosial berkelanjutan.

Peran media dalam membentuk opini publik semakin jelas melalui mekanisme agenda setting dan framing. Media memiliki kapasitas untuk memprioritaskan isu tertentu dan membingkai makna politik sehingga memengaruhi sikap masyarakat terhadap kebijakan, partai, dan aktor politik (Silalahi & Ivanna, 2024; Taibi et al., 2024; Fasha et al., 2025). Dalam kerangka dinamika kekuasaan, kemampuan media untuk menentukan isu apa yang dianggap penting dan bagaimana isu tersebut dipahami merupakan bentuk kekuasaan simbolik yang berdampak langsung pada legitimasi politik.

Selain media, tokoh masyarakat, keluarga, dan elit lokal memainkan peran signifikan dalam membentuk preferensi politik warga, khususnya dalam konteks pemilihan kepala desa. Jaringan sosial lokal berfungsi sebagai saluran utama penyebaran opini politik dan pembentukan kepercayaan, sehingga menjadi sumber penting bagi opini kelompok dan opini rakyat (Brutu et al., 2024; Siregar, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa opini publik tidak hanya dibentuk

oleh arus informasi media, tetapi juga oleh relasi sosial yang tertanam dalam struktur kekuasaan lokal.

Opini publik yang dibangun melalui komunikasi politik yang transparan dan partisipatif terbukti meningkatkan kepercayaan dan legitimasi pemerintah, terutama di tingkat desa (Simbolon & Ivanna, 2024; Silalahi & Ivanna, 2024; Siregar, 2023). Tingginya partisipasi politik warga kerap dipandang sebagai indikator kuat legitimasi pemerintahan terpilih (Chairunisa et al., 2024; Silalahi & Ivanna, 2024; Siregar, 2023). Namun demikian, tanpa literasi media yang memadai, opini publik menjadi rentan terhadap manipulasi melalui hoaks, politik uang, dan kampanye negatif, yang pada akhirnya merusak kualitas demokrasi dan relasi kekuasaan yang sehat (Chairunisa et al., 2024; Brutu et al., 2024; Silalahi & Ivanna, 2024; Siregar, 2023).

Secara teoretis, subkajian ini berkontribusi pada penguatan perspektif dinamika kekuasaan dengan menegaskan bahwa opini publik merupakan arena kontestasi antara negara, elite, media, dan warga. Pembedaan antara opini massa, opini kelompok, dan opini rakyat sejalan dengan temuan empiris mengenai peran media, organisasi, dan tokoh lokal dalam membentuk sikap politik warga. Dalam komunikasi politik demokratis, pengelolaan opini publik yang partisipatif, etis, dan inklusif menjadi prasyarat penting bagi legitimasi kebijakan dan keberlanjutan kekuasaan politik.

9.4. Kekuasaan dan Dinamika Politik

Kekuasaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kapasitas koersif negara atau aktor politik formal, melainkan sebagai relasi dinamis yang bekerja melalui produksi makna, kontrol narasi, dan pengaturan persepsi publik. Sementara media, baik media arus utama maupun media digital menjadi arena utama tempat kekuasaan tersebut dijalankan, dipertahankan, dan diperebutkan. Oleh karena itu, memahami dinamika politik modern mensyaratkan analisis

KONFLIK POLITIK DAN RESOLUSI KEKUASAAN

Oleh: Dr. Hajir Bahrin Maula, S.Sos., M.Si.

10.1. Konflik Politik

Konflik dapat memberi dampak secara positif fungsional sejauh ia memperkuat kelompok dan secara negatif fungsional sejauh ia bergerak melawan struktur (Poloma, 1994). Konflik adalah bentuk perasaan yang tidak beres yang melanda hubungan antar satu bagian dengan bagian lain, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain (Liliweri, 1997). Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah (Surbakti, 2010).

Konflik antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama, tetapi konflik akan selalu menuju ke arah kesepakatan atau konsensus (Surbakti, 2010; Eviany, 2019). Konflik yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan perpecahan yang merusak kehidupan masyarakat (Tunner, 1998). Suatu konflik biasanya berawal dari kontroversi kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik,

kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses suatu konflik (Hidayat, 2009). Politik berkenaan dengan penyelenggaraan sebuah negara (Weber, 1994; Eviany, 2019).

Konflik politik dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah (Surbakti, 2010). Konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial, di mana keduanya memiliki ciri-ciri mirip, hanya yang membedakan konflik sosial dan politik adalah kata politik yang membawa konotasi tertentu bagi istilah konflik politik yakni mempunyai keterkaitan dengan negara atau pemerintah, para pejabat politik atau pemerintahan, dan kebijakan (Rauf, 2001).

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli konflik politik dapat didefinisikan sebagai pertentangan, persaingan, atau perbedaan pendapat antara individu, kelompok, atau organisasi yang berupaya untuk memperoleh, mempertahankan, atau mempengaruhi sumber daya kekuasaan, dan kebijakan yang dibuat pemerintah.

10.2. Resolusi Kekuasaan

Resolusi kekuasaan, bila dikaitkan dengan konteks ilmu politik dan sosiologi, sering kali merujuk pada upaya penyelesaian, pengelolaan, atau pembagian kekuasaan untuk mencegah konflik, penyalahgunaan (*abuse of power*), dan menciptakan stabilitas. Berikut adalah pandangan beberapa ahli mengenai konsep kekuasaan dan cara mengelolanya (resolusi/pembagian). Montesquieu menekankan resolusi kekuasaan melalui pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) untuk menghindari *absolutisme*.

Pemisahan kekuasaan sering kali dikenal dengan istilah “Trias Politika berasal dari bahasa Yunani “Tri yang berarti tiga, “As” yang

berarti poros/pusat, dan “Politika” yang berarti kekuasaan (Mulyadi, dkk., 2025). Adapun definisi dari Trias Politika adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif (Mulyadi, dkk., 2025). Kekuasaan Legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (Busroh, 2010; Mulyadi, dkk., 2025). Konsep Trias Politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama (satu orang) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa (Budiardjo, 2005; Mulyadi, dkk., 2025).

Resolusi dalam pandangan Weber seringkali berkaitan dengan legitimasi kekuasaan (bagaimana kekuasaan diakui sah oleh masyarakat) agar tidak menimbulkan perlawanan yang terus-menerus. Legitimasi adalah pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan yang diberikan kepada pemimpin melalui berbagai cara, baik keagamaan maupun non keagamaan seperti pemilihan demokratis atau penobatan raja legitimasi menciptakan hubungan sah antara pemimpin yang dipimpin, keputusan atau kebijakan pemerintah yang otoritas, yaitu kekuasaan yang sah dan diakui oleh masyarakat dianggap tepat dan layak ditaati (Roihanah, dkk., 2022; Quirunnisa dan Wahyuni, 2025).

Legitimasi merupakan konsep yang menunjukkan sejauh mana suatu otoritas, kekuasaan, atau kebijakan dianggap sah hanya bergantung pada aspek formal atau hukum semata, tetapi juga pada penerimaan sosial, norma dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat (Saputra dan Suyatno, 2024; Quirunnisa dan Wahyuni, 2025). Legitimasi juga mencakup aspek moral dan manfaat yaitu sejauh mana kebijakan yang dijalankan memberikan keadilan dan kebaikan bagi masyarakat (Wulandari dan Puteri, 2021; Quirunnisa

dan Wahyuni, 2025). Dengan demikian legitimasi menurut Weber bukan hanya formalitas hukum, tetapi juga pengakuan sosial dan moral dari masyarakat terhadap pemegang kekuasaan (Quirunnisa dan Wahyuni, 2025).

Michel Foucault menolak pandangan tradisional bahwa kekuasaan bersifat terpusat (seperti pada negara atau raja), melainkan memandangnya sebagai relasi yang menyebar (*omnipresent*) diseluruh tubuh sosial dan bekerja melalui wacana (dis kursus) serta pengetahuan. Kekuasaan bisa bertahan dan diterima jika didasarkan atas fakta, untuk memproduksi pengetahuan dan dioperasionalkan secara terus menerus dalam kehidupan sosial (Foucault, 1980; Rambe, dkk., 2019). Kekuasaan merupakan ilmu pengetahuan, sehingga keberadaan ilmu pengetahuan merupakan kekuasaan itu sendiri (Foucault, 1980; Rambe, dkk., 2019). Relasi dominasi merupakan bentuk relasi kekuasaan yang asimetris di mana subjek yang didominasi memiliki keterbatasan ruang untuk bermanuver atau menentukan pilihan suatu tindakan (Foucault, 1982). Kekuasaan sebagai dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan, walaupun orang lain menentangnya (Mills, 1962).

Miriam Budiardjo yang telah merumuskan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang/kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang/sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang/kelompok lain dengan sedemikian rupa sehingga tingkah lakunya sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu sendiri (Budiardjo, 1992).

Di antara hasrat dan keinginan manusia yang tidak berhingga itu, yang paling penting adalah hasrat untuk meraih kekuasaan dan kemasyhuran (Russell, 2019; Nain, 2023). Merupakan suatu kekeliruan jika memperlakukan kekuasaan bersifat menimbulkan perselisihan secara inheren, namun memang tidak ada keraguan bahwa sebagian

konflik yang paling tajam dalam kehidupan sosial dipandang secara akurat sebagai perjuangan merebut kekuasaan (Giddens, 2010; Nain, 2023). Pewaris akan secara otomatis memiliki kekuasaan dari kedudukan tersebut (Haryanto, 2017).

Kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif dalam suatu sistem yang merupakan kewajiban kewajiban yang diakui dengan acuan kepada pencapaian tujuan-tujuan kolektif mereka dan bila ada pengingkaran terhadap kewajiban kewajiban dapat dikenai oleh sanksi negatif tertentu siapapun yang menegakkannya (Parsons, 1957). Kekuasaan adalah apa yang dapat diperoleh seseorang/kumpulan untuk mengamalkan ahli tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak dapat dilakukan melebihi kekuasaan yang diperoleh atau kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku individu/kelompok sesuai keinginan orang pelaku tersebut (Budiardjo, 2002).

Selain berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan penetapan alternatif alternatif bertindak, kekuasaan juga mengandung makna sarana pelaksanaan fungsi fungsi dalam masyarakat dan atas nama masyarakat (Parsons, 1967). Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk dapat menghasilkan perubahan dalam hubungan hukum yang diberikan dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Efriza, 2016). Pemegang kekuasaan bisa jadi merupakan seorang individu ataupun kelompok (Efriza, 2016). Kekuasaan tidak sama dengan kekuatan, kekuasaan adalah kapasitas untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan bahwa individu perlu melakukan keinginan untuk mempengaruhi (Heywood, 2004).

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli, resolusi kekuasaan bukan sekadar “menghilangkan” kekuasaan, melainkan mengelola, membagi, membatasi dan melegitimasi kekuasaan agar tercipta keadilan dan stabilitas.

Referensi

- Budiardjo, M. (1992). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2002). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, M. (2005). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, A. D. (2010). Ilmu negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Efriza. (2016). Kekuasaan politik: perkembangan konsep, analisa dan kritik. Malang: Intrans Publishing.
- Eviany, E. (2019). Pengantar ilmu politik dan ruang lingkupnya. Bandung: Cendekia Press.
- Foucault, M. (1980). Power/knowledge: selected interviews and other writings, 1972-1979, (ed. Colin Gordon). New York: Pantheon.
- Foucault, M. (1982). The subject and power. *Critical Inquiry*, 8 (4), 777-795. doi: 10.1086/448181
- Giddens, A. (2010). Teori strukturas, dasar-dasar pembentukan struktur sosial masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryanto (2017). Elit, massa, dan kekuasaan: suatu bahasan pengantar. Yogyakarta: PolGov.
- Heywood, A. (2004). *Political theory: an introduction*. Palgrave Macmillan.
- Liliweri, A. (1997). Sosiologi organisasi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mills, C. W. (1962). *The power elite*. Oxford: University Press.
- Mulyadi., Suhariyanto, D., & Hartana. (2025). Indonesia tidak menganut trias politica. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3 (2), 48-57.
- Nain, U. (2023). Sosiologi kekuasaan desa kontestasi dalam arena pemilihan kepala desa. Depok: Rajawali Pers.
- Parsons, T. (1957). The distribution of power in american society. *World Politics*, 10 (1), 123-143.

- Parsons, T. (1967). *Sociological theory and modern society*. New York: The Free Press.
- Poloma, M. M. (1994). *Sosiologi kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Quirunnisa, A., & Wahyuni, Y. S. (2025). Legitimasi kekuasaan dalam perspektif max weber pada pemerintahan kontemporer. *Journal Transformation of Mandalika*, 6 (12). 592-598.
- Rambe, T., Lukitoyo, P.S., Saragih, S. N., & Khairani, L. (2019). *Sejarah politik dan kekuasaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rauf, M. (2001). *Konsensus dan konflik politik: sebuah penjajagan teoritis*. Jakarta: Dirjen DIKTI.
- Roihanah, R., Setiawan, F., Setianto, E., & Istinganah, I. (2022). Legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Education and Development*, 10 (3), 94-99.
- Rusell, B. (2019). *Kekuasaan, sebuah analisis sosial dan politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saputra, H. R., & Suyatno, S. (2024). Kekuasaan sebagai dasar legitimasi hukum dalam pemikiran filsafat hukum. *Al-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5 (1), 1206-1217.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tunner, J. H. (1998). *The structure of sociological theory*. Wadsworth Publishing Company University of California.
- Wulandari, A., & Puteri, D. (2021). Krisis legitimasi pemerintahan di era pandemic covid-19. *Lontar Merah*, 4 (1), 307-315.
- Weber, M. (1994). *Konsep-konsep dasar dalam sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

PROFIL PENULIS



Arditya Prayogi

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Penulis lahir di Palembang pada tanggal 18 September 1987. Penulis adalah tenaga teknis pada Perpustakaan UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menempuh pendidikan tinggi di bidang Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penulis menekuni bidang tulis menulis sebagai bagian dari salah satu profesi yang ditekuni. Penulis dapat dihubungi lewat surel arditya.prayogi@uingusdur.ac.id

PROFIL PENULIS



**Pirma Windra, S.I.P., M.I.P.
Dosen Ilmu Pemerintahan
Universitas Pamulang**

Pirma Windra lahir di Kerinci pada 15 Mei 1998. Ia menamatkan pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran pada tahun 2023 setelah sebelumnya menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Jambi pada 2020. Setelah menyelesaikan studinya, ia aktif melakukan research dan juga seorang penulis dalam bidang politik dan pemerintahan.

Selain berpraktik di pemerintahan, ia aktif menulis dan mempublikasikan kajian tentang transformasi layanan serta efektivitas pelayanan publik. Ia juga sering terlibat sebagai fasilitator dan narasumber dalam pelatihan. Melalui perpaduan pengalaman akademik, profesional, dan kegiatan kepelatihan, ia terus berupaya mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik.

PROFIL PENULIS



Muhammad Akbar Maulana, S.I.P., M.I.P.
Dosen Ilmu Pemerintahan
Universitas Pamulang

Muhammad Akbar Maulana, S.I.P., M.I.P., adalah akademisi dan peneliti di bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan, dengan fokus kajian pada teori negara, kedaulatan, kekuasaan, dan tata kelola pemerintahan dalam konteks negara demokratis. Aktivitas akademiknya banyak diarahkan pada analisis konseptual dan empiris mengenai hubungan antara negara, konstitusi, sistem pemerintahan, serta dinamika kekuasaan dalam praktik politik modern.

Minat keilmuannya mencakup pemikiran politik klasik dan kontemporer, teori kedaulatan, negara hukum, serta mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi. Dalam berbagai karya dan kegiatan akademik, penulis secara konsisten mengkaji bagaimana konsep-konsep fundamental ilmu politik seperti legitimasi, otoritas, dan kedaulatan berinteraksi dengan tantangan globalisasi, demokratisasi, dan perubahan tata kelola pemerintahan.

Selain aktif dalam kegiatan pengajaran dan penulisan ilmiah, penulis juga terlibat dalam pengembangan literasi politik dan

kewargaan melalui berbagai forum akademik dan kegiatan sosial-
edukatif. Keterlibatan ini mencerminkan komitmen penulis untuk
menjembatani diskursus teoritis ilmu politik dengan realitas praksis
kehidupan bernegara dan berdemokrasi di Indonesia.

Buku ini merupakan kontribusi akademik penulis dalam
memperkaya khazanah literatur Ilmu Politik, khususnya dalam
memahami konsep negara dan kedaulatan sebagai fondasi utama
analisis politik dan pemerintahan. Diharapkan karya ini dapat menjadi
rujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, serta pembaca yang memiliki
ketertarikan pada studi negara, kekuasaan, dan dinamika politik
kontemporer.

PROFIL PENULIS



Apsas Saputra, S.A.P., M.A.P.
Dosen Ilmu Politik
Universitas Bangka Belitung

My name is Apsas Saputra, and I am a lecturer in Political Science at the University of Bangka Belitung. My academic background is in Public Administration, with particular expertise in public policy and public service studies. My teaching and research focus on governance, policy analysis, and the development of effective and community-oriented public service systems. I graduated with a bachelor's degree in public administration from Sriwijaya University and a master's degree in public administration from Diponegoro University. I actively write articles in various online media and journals accredited by Sinta Kemenristekdikti.

PROFIL PENULIS



Kharis Kurnia, S.E., M.Si.
Dosen Hubungan Internasional
Universitas Bangka Belitung

Kharis Kurnia, S.E., M.Si. merupakan dosen Hubungan Internasional di Universitas Bangka Belitung yang menekuni kajian keamanan internasional. Fokus risetnya pada studi strategi dan pertahanan, dengan perhatian khusus pada perkembangan keamanan dan dinamika Hubungan Internasional di kawasan Asia Selatan.

PROFIL PENULIS



Hamzah Jamaludin, S.I.P., M.Sos.
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
STISIP Widyapuri Mandiri

Hamzah Jamaludin, adalah Akademisi dan Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Widyapuri Mandiri. Memiliki minat riset di bidang Demokrasi, Ekologi Politik dan Gerakan Sosial. Jurnal yang pernah ditulisnya yaitu *Community Resistance to Development of the Semarang-Demak Sea Embankment Toll Road* (2025), *Digital Activism Resistance Movement in Mining Development Conflict in Wadas Village Central Jawa Province* (2025), *Perbandingan Model Kampanye Politik Desak Anies dan Gemoy pada Pemilu 2024* (2024).

Buku-bukunya yang pernah terbit di antaranya *Politik dan Kebijakan Publik dari Perumusan Hingga Implementasi* (2025), *Pengantar Ilmu Politik* (2025), *Pengantar Ilmu Pemerintahan; Konsep, Sistem dan Praktik* (2025). *Kekuasaan, Otoritas dan Legitimasi: Analisis Politik Kritis* (2026).

PROFIL PENULIS



Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H.

**Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo**

Seorang Penulis dan Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Penulis menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Gorontalo Jurusan Pendidikan Ekonomi, S1 Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Ichsan Gorontalo dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) dan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Jawa tengah. Penulis telah banyak berkontribusi dalam menulis karya-karya ilmiah; jurnal beriputasi nasional dan internasional serta menulis sejumlah buku. Selain itu penulis berkesempatan menjadi narasumber dan saksi ahli. Penulis dapat dihubungi melalui email: erman@ung.ac.id

PROFIL PENULIS



Syarkawi, S.A.P., M.A.P.
Dosen Administrasi Negara
Universitas Pamulang

Lahir di Blang Makmur pada tanggal 1 Juni 1994. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Blang Makmur (2000-2005), kemudian pindah ke SD Negeri Percontohan Kuala Batee (2005-2006) melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Kuala Batee (2006-2009), dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMKN 1 Babahrot (2009-2012). Pendidikan tinggi ditempuh di Universitas Negeri Padang, meraih gelar Sarjana Administrasi Publik (S.A.P.) dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik lulus tahun 2016. Kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Andalas, meraih gelar Magister Administrasi Publik (M.A.P.) dari Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik lulus pada tahun 2023. Penulis memiliki konsentrasi keahlian dalam bidang Ilmu Administrasi Publik dengan fokus kajian pada Manajemen Publik dan Kebijakan Publik yang meliputi studi tentang Tatakelola Pemerintahan, Ekologi Politik dan Kebijakan Publik.

PROFIL PENULIS



Muhamad Hanif Fuadi, M.Sos.

**Dosen Komunikasi Penyiaran Islam
Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya**

Penulis seorang dosen yang menekuni bidang komunikasi, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Menulis berbagai karya ilmiah yang membahas komunikasi dakwah, pendidikan karakter, serta peran komunikasi dalam pembangunan sosial dan keagamaan. Beberapa topik yang sering ia angkat antara lain: Efektivitas dakwah untuk generasi muda, Komunikasi dalam penguatan kesehatan mental siswa madrasah, Pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera, Representasi budaya Islam dalam media dan Komunikasi politik Islam di era digital. Terlibat dalam penulisan buku-buku ajar seperti: Seni Komunikasi dan Teori Komunikasi, yang dirancang untuk memperkuat keterampilan komunikasi di era digital. Kemudian, Buku “Teori Komunikasi” yang membahas tentang kompleksitas dan mendalamnya ilmu komunikasi, termasuk pengantar teori komunikasi, perspektif dalam teori komunikasi, dan teori media dan budaya. Email Penulis: fuadi9070@gmail.com

PROFIL PENULIS



Dr. Hajir Bahrhun Maula, S.Sos., M.Si.

Dr. Hajir Bahrhun Maula, S.Sos., M.Si. Penulis merupakan dara kelahiran Kololio, 28 November 1979. Anak pertama dari 8 bersaudara, merupakan Putra dari Bahrhun Maula dan Kona Wolu’o. Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Inpres Sabo (SD), tamat tahun 1993, Pendidikan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Padauloyo (SMP), tamat tahun 1996, Pendidikan Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Poso (SMU), tamat tahun 1999, Pendidikan Sarjana Sosiologi Universitas Tadulako (S1), tamat tahun 2003, Pendidikan Magister Sains konsentrasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan Universitas Tadulako (S2), tamat tahun 2012, Pendidikan Doktor Sosiologi Universitas Padjadjaran (S3) tamat tahun 2021. Pernah menduduki jabatan Sekretaris Program Studi, “Sosiologi” tahun 2014-2015 di Universitas Tadulako. Pekerjaan Dosen tetap pada Program Studi, “Sosiologi” Jurusan Ilmu Sosial FISIP Universitas Tadulako.

ILMU POLITIK DAN DINAMIKA KEKUASAAN

Ilmu Politik dan Dinamika Kekuasaan mengupas politik sebagai disiplin ilmu yang tidak terlepas dari realitas sosial, institusi negara, dan relasi kekuasaan yang terus berkembang. Buku ini menyajikan pembahasan menyeluruh mengenai konsep-konsep dasar ilmu politik, termasuk negara, kekuasaan, legitimasi, demokrasi, sistem politik, sistem pemerintahan, partai politik, serta peran masyarakat dalam proses politik.

Selain menguraikan landasan teoretis, buku ini juga mengkaji bagaimana kekuasaan bekerja dalam praktik, baik melalui mekanisme formal seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun melalui dinamika informal yang membentuk kebijakan publik dan arah pembangunan nasional. Perhatian khusus diberikan pada konteks politik Indonesia, sehingga pembaca dapat memahami relevansi teori dengan dinamika empiris yang terjadi.

Disusun secara sistematis dan analitis, buku ini membantu pembaca menelusuri hubungan antara teori politik dan praktik kekuasaan, sekaligus mendorong kemampuan berpikir kritis dalam menilai proses politik yang berlangsung. Dengan pendekatan yang integratif dan bahasa yang lugas, buku ini menjadi referensi penting bagi siapa pun yang ingin memahami bagaimana kekuasaan dibangun, dijalankan, dan diawasi dalam sistem politik modern.

ISBN 978-634-7474-67-4



9

786347

474674



**Penerbit
Yayasan
Tri Edukasi Ilmiah**

edukasiilmiah@gmail.com
Jalan Raya Pakan Kamis, Gadut,
Tilatang Kamang, Kab. Agam, Sumatera Barat



Anggota IKAPI
No. 049/SBA/2024